

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Karakteristik Geografis Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan dari wilayah Propinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak pada koordinat $111^{\circ} 24'$ - $112^{\circ} 11'$ Bujur Timur dan $70^{\circ} 53'$ - $8^{\circ} 34'$ Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.261,40 Km². Kabupaten Trenggalek sebagian besar terdiri dari tanah pegunungan dengan luas meliputi 2/3 bagian luas wilayah. Sedangkan 1/3 bagian merupakan tanah dataran rendah. Ketinggian tanahnya diantara 0 hingga 690 meter diatas permukaan laut.

Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 kecamatan dan 157 desa. Hanya sekitar 4 kecamatan yang mayoritas desanya dataran, yaitu: Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan. Sedangkan 10 Kecamatan lainnya mayoritas desanya Pegunungan. Menurut luas wilayahnya, 4 Kecamatan yang luas wilayahnya kurang dari 50,00 Km². Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Gandusari, Durenan, Suruh, dan Pogalan. Sedangkan 3 Kecamatan yang luasnya antara 50,00 Km² - 100,00 Km² adalah Kecamatan Trenggalek, Tugu, dan Karang. Untuk 7 Kecamatan lainnya mempunyai luas diatas 100,00 Km².

Kabupaten Trenggalek memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo dan Tulungagung

Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Ponorogo dan Pacitan

a. Iklim dan Situasi Umum

Iklim Kabupaten Trenggalek berada di sekitar garis katulistiwa, oleh karena itu seperti kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Timur, Kabupaten Trenggalek mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 jenis setiap tahunnya yakni musim kemarau dan musim penghujan. Bulan September - April merupakan musim penghujan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei - Agustus. Data cuaca dan curah hujan menunjukkan pola musim penghujan dan musim kemarau setiap tahunnya.

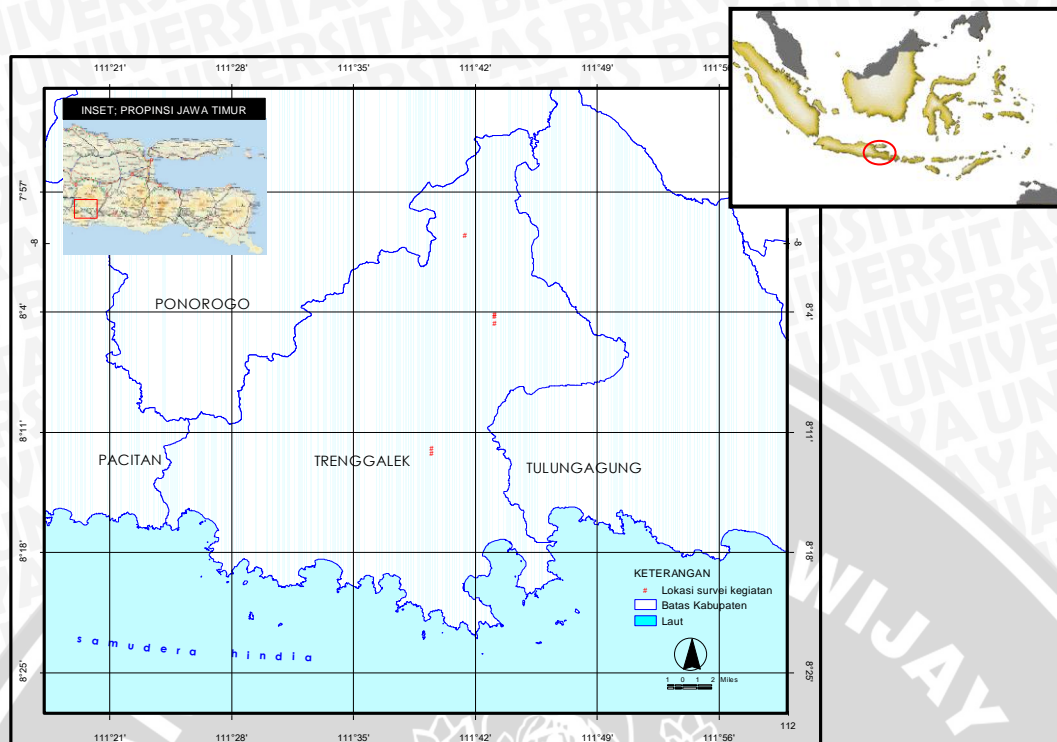
b. Daratan dan Kecamatan

Pada tahun 2011 pengusahaan tanah untuk sawah tercatat hanya sebanyak 9,70 persen dari luas daerah. Akan lebih menguntungkan bila pengusahaan tanah lebih dikembangkan untuk usaha lain yang bukan pertanian tanaman pangan saja, misalnya tanaman perkebunan (cengkeh, kopi, dan lain-lain), tanaman keras dan hortikultura (durian, mangga, dan lain-lain). Hal ini mengingat kondisi tanah yang banyak mengandung berbagai ragam barang galian yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Dilihat dari penggunaan tanah di wilayah Kabupaten Trenggalek, terlihat paling banyak adalah hutan negara yaitu 48,31 persen dari wilayah kabupaten. Sebagian dari wilayah hutan tersebut terdapat lahan kritis.

Selain itu terdapat hutan rakyat dengan luas 16.607,5 Ha dengan produksinya antara lain sengon, akasia, mahoni, jati, dll, dengan produksi kayu bulat dan kayu bakar.

c. Gunung dan Sungai

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah adalah banyaknya gunung berapi yang masih aktif serta aliran sungai yang cukup besar. Gunung berapi dan sungai yang lebar berfungsi sebagai sarana penyebaran zat-zat hara yang terkandung dalam material hasil letusan gunung berapi. Kabupaten Trenggalek tidak mempunyai gunung berapi yang masih aktif, yang ada hanya gunung-gunung kecil yang tidak aktif dan lebih mirip disebut perbukitan. Dari gunung-gunung kecil tersebut banyak terkandung bahan tambang, misalnya marmer, mangan, kaolin, dan lainlain. Sedangkan sungai di Kabupaten Trenggalek terdiri atas 28 sungai dengan panjang antara 2,00 Km hingga 41,50 Km. Adapun sumber air yang tercatat sejumlah 361 mata air yang tersebar di masing-masing kecamatan dan sebagian besar sudah dimanfaatkan.



Gambar 5. Peta Wilayah Kabupaten Trenggalek
Sumber : Kabupaten Trenggalek Dalam Angka Tahun 2012

d. Visi dan Misi Kabupaten Trenggalek

- 1) **Visi** : Perubahan Menuju Terwujudnya Masyarakat Trenggalek yang Sejahtera dan Berakhlak
- 2) **Misi** : Pembangunan Pro Rakyat
- 3) **Strategi Pokok Pembangunan**
 - a. Pelayanan Prima
 - b. Perluasan Lapangan Kerja
 - c. Peningkatan Kemampuan Usaha Kecil dan Menengah
 - d. Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan
 - e. Pemberdayaan Perempuan (Peran Gender)
- 4) **Agenda Utama Pembangunan**
 - a. Reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik;

- b. Percepatan pertumbuhan ekonomi;
- c. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
- d. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi rakyat;
- e. Penguatan pemerintahan desa;
- f. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender;
- g. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial;
- h. Mengoptimalkan sumber daya daerah;
- i. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang.

2. Gambaran Umum Kecamatan Bendungan

a. Kondisi Geografis

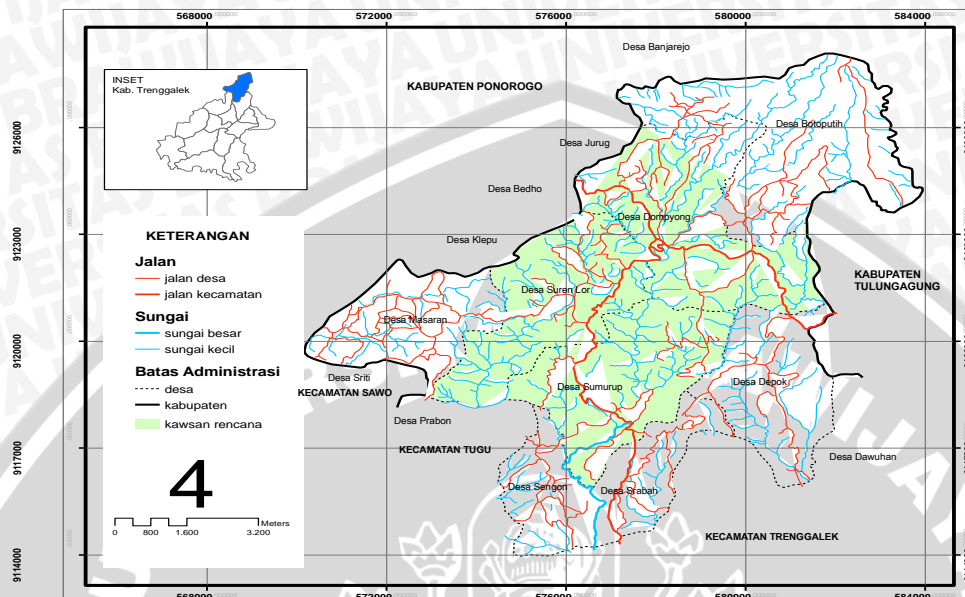
Kecamatan Bendungan merupakan salah satu wilayah dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Trenggalek yang terletak di sebelah selatan provinsi Jawa Timur. Secara administratif Kecamatan Bendungan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung

Sebelah Barat : Kabupaten Ponorogo

Sebelah Selatan : Kecamatan Trenggalek

Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung



Gambar 6. Peta Wilayah Kecamatan Bendungan
 Sumber : Kecamatan Bendungan Dalam Angka Tahun 2012

Kecamatan Bendungan memiliki jumlah penduduk 26.312 jiwa tersebar dalam 8 desa yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk mencapai 289,59 jiwa/km². Kecamatan Bendungan meliputi 8 desa, yaitu Masaran, Sengon, Sumurup, Srabah, Depok, Surenlor, Dompnyong, dan Botoputih. Sebagian besar wilayah Kecamatan Bendungan mempunyai topografi bergelombang atau daerah pegunungan. Daerah ini sebagai suatu kawasan pegunungan yang terletak pada ketinggian 390 m di atas permukaan laut. Daerah ini mempunyai kondisi agroklimat yang lebih spesifik dengan suhu udara lebih rendah yang didukung dengan curah hujan yang lebih tinggi sebesar 3.000 mm.

b. Geologi dan Jenis Tanah

Formasi geologi di Kecamatan Bendungan terdiri dari beberapa batuan yang membentuk batuan induk sebagai penyusun bahan induk. Beberapa jenis batuan mengalami formasi geologi membentuk beberapa bahan tambang seperti batuan kapur atau gamping, kaolin dan dan bahan tambang lainnya yaitu bruintal, andesit dan diorit yang dieksplorasi dan diusahakan sebagai bahan galian. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Bendungan adalah latosol dan kompleks latosol atau asosiasi latosol-mediteran. Jenis tanah latosol dalam formasi geologi terbentuk dari tubuh tanah laterit, yang didalam zone agroekologi merupakan tanah vulkanis rendah.

Kecamatan Bendungan memiliki luas 9.086 Ha. Terdiri dari 382 Ha lahan kering, dan 369 Ha lahan lainnya. Berdasarkan jenis tanahnya bagian utara merupakan regosol dan mediteran. Sebelah timur merupakan gramosol, sebelah selatan merupakan mediteran, dan sebelah barat merupakan regosol dan gromosol.

Sifat-sifat fisik tanah di Kecamatan Bendungan terutama tekstur didominasi fraksi liat (*clavew*) atau merupakan mineral liat yang bermuatan dan *variable*. Struktur tanahnya tidak lepas-lepas atau pada umumnya kompak. Sifat kimia tanah terutama keasaman tanah secara umum berkisar sedikit asam, sampai netral dengan pH 5,5-6,5. Tanah-tanah yang didominasi partikel liat umumnya subur dengan kapasitas tukar kation yang tinggi, disamping itu juga mempunyai daya menahan air (*water holding capacity*) yang besar. Kecamatan Bendungan tercatat sebagai penghasil tanah liat yang paling tinggi sekitar 2000 ton.

c. Kemiringan Tanah

Kondisi kelerengan lahan di kecamatan Bendungan dapat diuraikan bahwa sebagian besar mempunyai topografi bergelombang atau berbukit-bukit dengan tingkat kemiringan yang cukup besar. Kondisi kelerengan atau tingkat kemiringan lahan rata-rata cukup besar lebih kurang 15% sampai 40%. Hal inilah yang menyebabkan pengusahaan atas lahan oleh penduduk terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki tingkat kelerengan lahan yang berkategori rendah. Pada tanah-tanah yang mempunyai kemiringan lahan lebih dari 15% umumnya pemanfaatan lahan dilakukan dengan cara terasering. Kemiringan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi tanah. Kondisi kemiringan lahan di Kecamatan Bendungan dibedakan menjadi 3 (tiga) kelas kemiringan, yang seluruhnya memiliki karakteristik berbeda sehingga dalam pemanfaatannya perlu dibedakan berdasarkan fungsinya, misalnya untuk kawasan lindung pada lahan-lahan dengan tingkat kemiringan tinggi.

Sumber air di Kecamatan Bendungan berupa mata air, sungai dan air sumur. Seluruh desa di kecamatan Bendungan memiliki sumber mata air dengan debit yang bervariasi, diantaranya sumber Bergul di Desa Dompok, sumber Ngesong di Desa Botoputih, sumber Pt. Wulung dan Gunung Cilik di Desa Surenlor. Di Desa Srabah terdapat sumber mata air yang cukup besar debitnya yaitu sumber Tumpak Lo, sumber Jamur Dipo di Desa Masaran, sumber Gebang di Desa Sengon, sedangkan di Desa Sumurup terdapat Sumber Guwo dan sumber tumpak Dolo di Desa Depok dan beberapa sumber mata air lainnya. Akan tetapi pada

musim kemarau ada beberapa sumber air yang menurun debitnya, sehingga diperlukan sarana penampungan air untuk kebutuhan di musim kemarau.

Disamping sumber-sumber mata air tersebut, di Kecamatan Bendungan juga terdapat sungai-sungai yang dimanfaatkan untuk air bersih dan irigasi. Sungai-sungai tersebut adalah sungai Bagong yang melintas di Desa Dompiong, Botoputih, Srabah, Sengon, Sumurup dan Depok. Sungai Prambon melintas di Desa Surenlor dan Masaran, sedangkan di Desa Depok terdapat sungai Sukun. Potensi sumber daya air yang ada terdapat di desa Botoputih, Depok, Dompiong dan Suren Lor berupa air sungai dan mata air dengan debit 1,2-2,0 m³/detik. Sumber air ini digunakan untuk keperluan air irigasi. Sedang untuk penggunaan air bersih atau air minum, penduduk menggunakan mata air dan sumur gali. Jumlah mata air terbesar terdapat di Desa Masaran 72 unit dan untuk sumur gali terbesar di Desa Surenlor dengan jumlah 24 unit.

d. Kondisi Kependudukan

Berdasarkan pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun di Kecamatan Bendungan dari 1999 sampai dengan 2003 sebesar 0,4 % per tahun maka dapat diproyeksikan jumlah penduduk sebagaimana tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2
Proyeksi Jumlah Penduduk di Kecamatan Bendungan

No	Desa	Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2003	2004	2007	2010	2014
1	Masaran	2244	2253	2280	2308	2345
2	Dompyong	3465	3479	3521	3563	3621
3	Boto putih	3914	3930	3977	4025	4090
4	Suren Lor	2631	2642	2673	2706	2749
5	Sumurup	5681	5704	5772	5842	5936
6	Srabah	2043	2051	2076	2101	2135
7	Depok	4240	4257	4308	4360	4430
8	Sengon	1672	1679	1699	1719	1747
	Jumlah	25890	25994	26307	26624	27052

Sumber : Rencana Masterplan Kawasan Agropolitan Kecamatan Bendungan Tahun 2004

Hasil registrasi penduduk yang tersaji pada buku rencana kawasan agropolitan Kecamatan Bendungan menunjukkan bahwa dari 8 desa yang ada, Desa Sumurup merupakan desa dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 5.681 jiwa. Konsentrasi penduduk yang tinggi pada suatu kawasan mengindikasikan adanya kegiatan ditempat tersebut.

3. Gambaran Umum Desa Sumurup Kecamatan Bendungan

Desa Sumurup merupakan salah satu desa di wilayah administratif Kecamatan Bendungan yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Surenlor dan Desa Dompyong Kecamatan Bendungan

Sebelah Barat : Desa Sengon Kecamatan Bendungan dan Desa Prambon Kecamatan Tugu

Sebelah Selatan : Desa Ngares Kecamatan Trenggalek dan Desa Srabah Kecamatan Bendungan

Sebelah Timur : Desa Srabah dan Desa Depok Kecamatan Bendungan

Beberapa tabel dibawah ini menjelaskan kondisi di Desa Sumurup berdasarkan data yang dilaporkan dalam Profil Desa Sumurup Tahun 2009.

Tabel 3
Penggunaan Lahan Desa Sumurup Tahun 2009

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Pemukiman	401
2	Pertanian Sawah	
	a) Sawah irigasi	102
	b) Sawah setengah teknis	20
	c) Sawah tadah hujan	44
3	Ladang/Tegalan	314,4
4	Hutan Produksi	215,07
5	Bangunan	
	a) Perkantoran	5
	b) Sekolah	15
	c) Pertokoan	2
	d) Pasar	1
	e) Jalan	1,5
6	Perikanan Darat (kolam)	1
7	Kuburan	1

Sumber : Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Kabupaten Trenggalek Tahun 2010.

Tabel 4
Kependudukan Desa Sumurup Tahun 2009

No	Keterangan	Jumlah (org)
1	Kepala keluarga	1815
2	Jumlah Penduduk	
	a) Tahun 2008	5631
	b) Tahun 2009	5681
3	Mata Pencarian Penduduk	
	a) Pegawai desa	13
	b) P N S	10
	c) T N I	5
	d) Guru	10
	e) Bidan	2
	f) Pensiunan T N I	5
	g) Pegawai swasta	596
	h) Pegawai BUMN/BUMD	52
4	Tingkat Pendidikan	
	a) Buta huruf	10
	b) Tidak tamat SD	25
	c) Tamat SD	1221
	d) Tamat SLTP	2208
	e) Tamat SMA	1809
	f) Tamat D 1	124
	g) Tamat D 2	85
	h) Tamat D 3	96
	i) Tamat S 1	103
5	Pengangguran	
	a) Usia 15 – 55 tahun yang belum bekerja	25
	b) Angkatan kerja usia 15-55 tahun	3814
6	Kesejahteraan Penduduk	
	a) Keluarga pra sejahtera	220 KK
	b) Keluarga sejahtera 1	114 KK
	c) Keluarga sejahtera 2	322 KK
	d) Keluarga sejahtera 3	520 KK
	e) Keluarga sejahtera 3 plus	639 KK

Sumber : Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Kabupaten Trenggalek Tahun 2010.

Tabel 5
Ekonomi Masyarakat Desa Sumurup Tahun 2009

No	Keterangan	Hasil (Rp)
1	Pendapatan Dosmestik Desa Bruto (PDDB 2009)	
	a) Pertanian	533.407.500
	b) Perkebunan	485.050.000
	c) Peternakan	6.061.520.000
	d) Perikanan	142.500.000
2	Jumlah PDDB	
	a) Tahun 2008	6.790.875.000
	b) Tahun 2009	7.222.472.500
3	Sarana Keuangan	
	a) Bank	1
	b) Usaha bersama	13
	c) Kelompok simpan pinjam	15 kelompok

Sumber : Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Kabupaten Trenggalek Tahun 2010.

Dari ketiga tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk penggunaan lahan yang paling luas adalah untuk pemukiman. Masalah kependudukan yang paling tinggi mata pencariannya adalah sebagai pegawai swasta, dan paling banyak warga yang tingkat pendidikannya hanya sampai tamat SLTP. Untuk tabel ketiga yaitu masalah ekonomi masyarakat untuk Pendapatan Dosmestik Desa Bruto (PDDB 2009) yang paling besar adalah dari peternakan.

4. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan, yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011. Kemudian dengan adanya perubahan kelembagaan daerah yang mengacu pada Peraturan Nomor 41 Tahun 2007 menyebabkan perubahan tugas

dan fungsi organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 124 Tahun 2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek serta Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 130 Tahun 2008 Tanggal 4 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja TPI sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.

Lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek berada di Jl. R. Ng Ronggowarsito Nomor 14 Kabupaten Trenggalek. Bangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari dua tingkat dengan luas total 344 m².

a. Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan

1). Tugas

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

2). Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan
- 3) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;

- 4) Penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, bidang usaha kelautan dan perikanan serta bidang perikanan budidaya;
- 5) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangan Daerah;
- 6) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang kelautan dan perikanan meliputi pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan, usaha kelautan dan perikanan, perikanan budidaya serta UPT Dinas dalam lingkup tugasnya;
- 7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Dinas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Struktur Organisasi

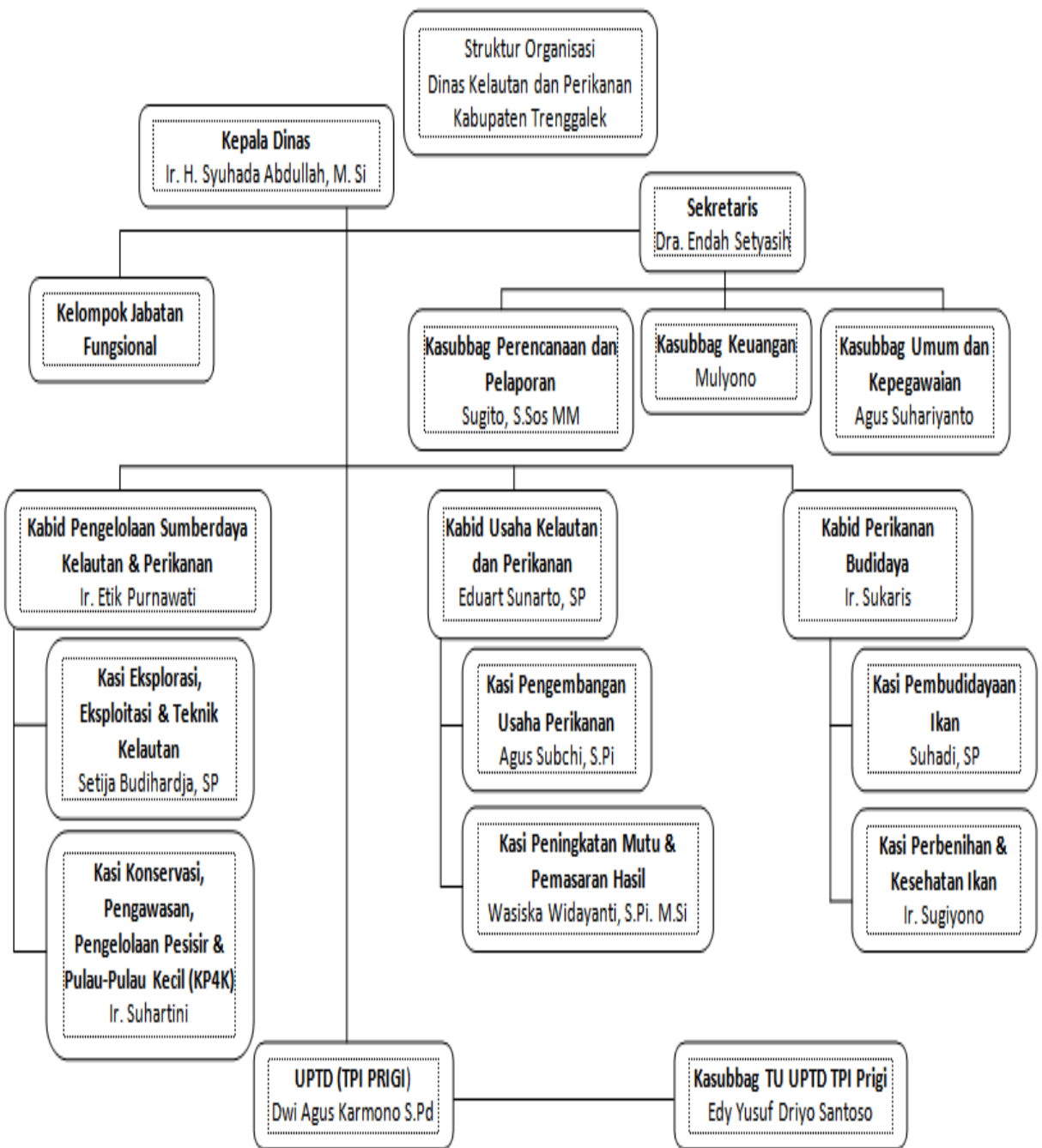
Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek terdiri dari :

- 1). Kepala Dinas
- 2). Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- 3). Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Seksi Eksplorasi, Eksploitasi dan Teknik Kelautan;
 - b. Seksi Konservasi, Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP4K).
- 4). Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan;
 - b. Seksi Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil.
- 5). Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembudidaya Ikan;
 - b. Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan.
- 6). Kelompok Jabatan Fungsional
- 7). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) – Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek sampai akhir tahun 2012 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 58 orang yang terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil = 40 orang
2. Tenaga Honorer/tenaga kontrak = 18 orang



Gambar 7. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek

c. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek

1). Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan, kemana dan bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan harus dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek merupakan gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai oleh masyarakat perikanan Kabupaten Trenggalek dengan landasan aspirasi, inspirasi, potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta kondisi lingkungan internal maupun eksternal. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek adalah :

**“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT PERIKANAN YANG BERDAYA,
SEJAHTERA, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN “**

Makna visi tersebut :

- 1) Masyarakat perikanan adalah mereka yang untuk sementara waktu atau untuk sepanjang waktu melakukan kegiatan perikanan dan atau usaha perikanan baik memiliki sendiri obyek usaha perikanan atau menyewa, bagi hasil dan sebagainya baik mengerjakan sendiri atau dikerjakan orang lain dengan tujuan dikonsumsi atau dijual hasilnya.
- 2) Usaha perikanan adalah semua unsur perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan atau memasarkan ikan untuk komersial maupun dikonsumsi.

- 3) Berdaya adalah berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, berakal sehat sehingga mampu mengatasi sesuatu secara sistematis, obyektif dan logik.
- 4) Sejahtera adalah makmur, aman dan sentosa, tidak kurang suatu apapun, selamat dan terlepas dari segala macam gangguan maupun kesulitan dalam berkehidupan sebagai nelayan atau petani ikan.
- 5) Berwawasan lingkungan adalah konsepsi cara pandang dan sikap setiap pihak yang terkait dengan aktivitas bidang Kelautan dan Perikanan baik langsung maupun tidak langsung, merasa berkewajiban untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya agar dapat di manfaatkan secara optimal berkesinambungan.

2). Misi

Untuk mewujudkan visi, Dinas Kelautan dan Perikanan menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai serta langkah-langkah strategik yang harus dilakukan, demi tercapainya tujuan tersebut yang dinyatakan dalam misi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek adalah :

- 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur dinas
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan
- 3) Melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan

d. Tujuan, Sasaran dan Program

1). Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah :

- 1) Mewujudkan ketertiban administrasi perkantoran;
- 2) Meningkatkan kinerja dan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan;
- 3) Meningkatkan produksi kelautan dan perikanan;
- 4) Meningkatkan kualitas produk perikanan;
- 5) Memperluas akses pasar produk perikanan;
- 6) Meningkatkan pendapatan masyarakat perikanan;
- 7) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat perikanan;
- 8) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat perikanan;
- 9) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara bijaksana dan berkelanjutan.

2). Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan.

Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek adalah :

- 1) Terwujudnya ketertiban administrasi perkantoran;
- 2) Meningkatkan kinerja dan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan;

- 3) Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan;
- 4) Meningkatnya kualitasnya produk perikanan;
- 5) Meluasnya akses pasar produk perikanan;
- 6) Meningkatnya pendapatan masyarakat perikanan;
- 7) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat perikanan;
- 8) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat perikanan;
- 9) Terkelolanya sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

3). Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek adalah :

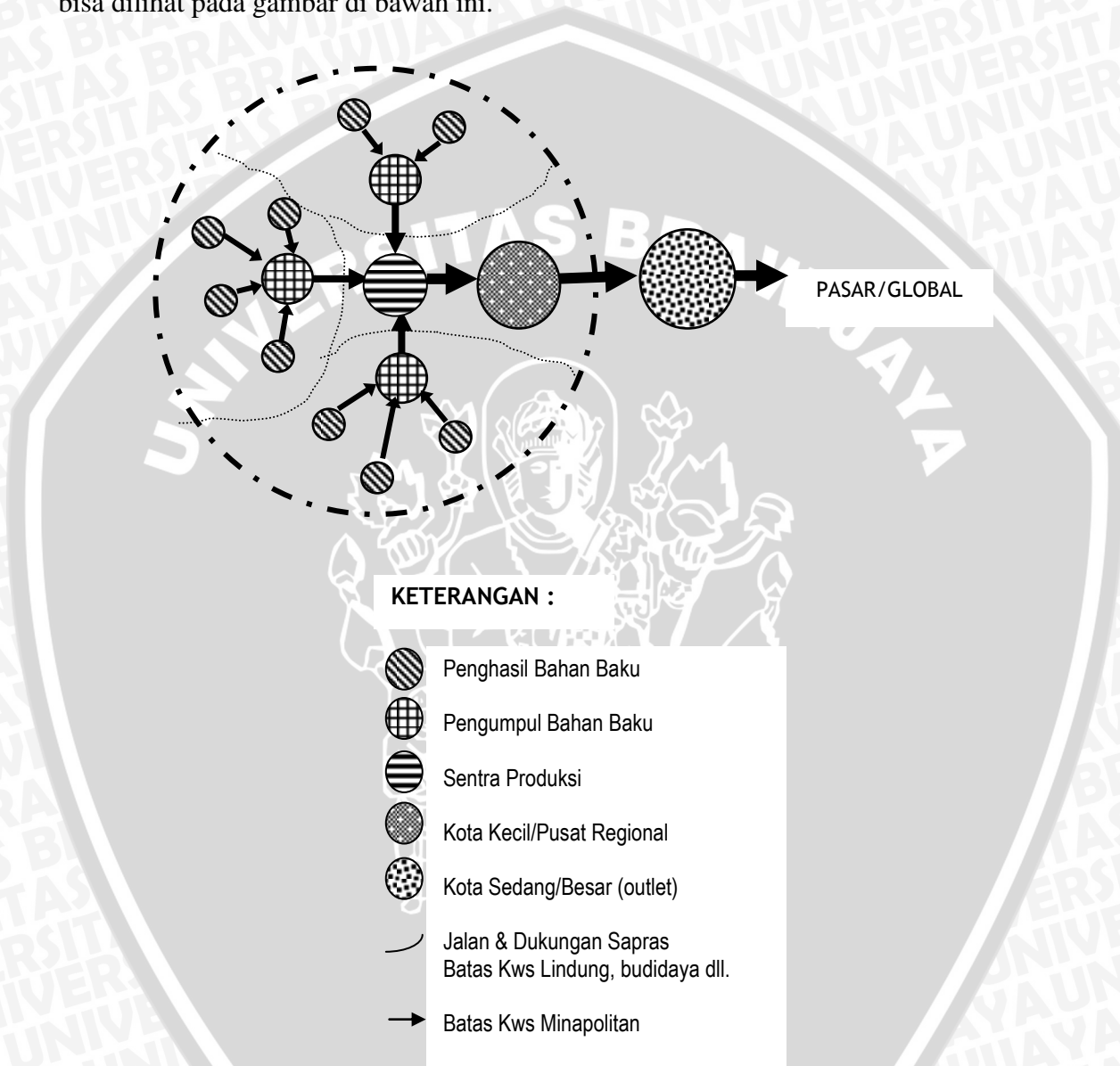
- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 4) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
- 5) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan;

- 6) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut;
- 7) Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut;
- 8) Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat;
- 9) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- 10) Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
- 11) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan;
- 12) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
- 13) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar.

5. Gambaran Umum Kebijakan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya

Berdasarkan isu dan permasalahan pembangunan perdesaan yang terjadi, pengembangan kawasan minapolitan merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah (perdesaan). Kawasan minapolitan disini diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat minapolitan dan desa-desa di sekitarnya membentuk kawasan minapolitan. Disamping itu, kawasan minapolitan ini juga dicirikan dengan kawasan perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha minabisnis di pusat minapolitan yang

diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan perikanan di wilayah sekitarnya. Konsepsi pengembangan kawasan minapolitan bisa dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 8. Konsepsi Pengembangan Kawasan Minapolitan
 Sumber : Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya
 Kabupaten Trenggalek Tahun 2010.

Gambar di atas menjelaskan bahwa pengumpul bahan baku memperoleh bahan baku dari berbagai daerah penghasil bahan baku, yaitu dari lokasi minapolitan yang menyebar di berbagai desa. Selanjutnya setelah dari pengumpul diteruskan ke sentra produksi/pusat produksi biasanya yaitu pasar daerah sekitar. Setelah itu untuk memperluas pemasaran akan dilanjutkan ke kota yang memiliki pusat pasar yang besar.

Perikanan di Kabupaten Trenggalek meliputi perikanan tangkap dan budidaya. Potensi perikanan tangkap di Kabupaten Trenggalek masih memiliki peluang untuk dikembangkan karena Trenggalek memiliki laut seluas 35.558 KM2 ZEE dengan garis pantai 96 KM dan didukung pelabuhan perikanan, yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi. Potensi perikanan darat Kabupaten Trenggalek meliputi lele, gurameh dan nila. Produksinya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 6
Produksi Ikan Air Tawar Menurut Jenis Ikan
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2000-2009 (ton)

Jenis Ikan	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Tawes	1,6	-	1,90	2,08	-	2,85	-	-	-	-
Mujaer	1,2	0,50	3,20	12,78	1,94	1,93	-	-	-	-
Gurameh	5,4	42,60	88,80	62,86	7,96	18,65	20,42	49,50	103,64	114,93
Gabus	1,8	0,81	1,00	2,46	0,26	2,65	-	-	-	-
Lele	241,3	298,57	438,45	467,41	453,65	836,45	995,45	1.331,27	1.411,02	1.627,71
Lain-lain	2,8	1,77	0,85	1,25	0,70	2,05	2,33	1,00	37,04	2,30
Nila	7,4	2,71	5,90	12,78	-	3,57	6,44	1,00	4,00	12,30

Sumber : Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025

Untuk Produksi ikan darat tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 12,95 persen dari tahun sebelumnya, dimana produksi ikan lele menempati urutan pertama produksi terbesar yaitu 1.627,71 ton dan disusul gurameh 114,93 ton di

urutan kedua dan nila di urutan ketiga dengan produksi sebanyak 12,30 ton. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ketiga jenis ikan tersebut produksinya terus mengalami peningkatan.

a. Penetapan Jenis Komoditas Usaha di Kabupaten Trenggalek

Penentuan jenis komoditas unggulan dilakukan didasarkan atas analisis kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan, dengan parameter ketersediaan dan kesesuaian lahan, dan prasarannya, ketersediaan sarana produksi, kemampuan pengelolaan budidaya, penanganan pasca panen, pemasaran, dukungan prasarana dan kelembagaan.

Berdasarkan data statistik perikanan untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur untuk 7 jenis ikan budidaya, ikan nila dan lele di Kabupaten Trenggalek merupakan jenis ikan budidaya dengan produksi (dalam ton) terbesar dibandingkan jenis ikan lainnya. Atas dasar potensi ini maka komoditas ikan nila merupakan jenis komoditas usaha yang dipilih dalam pekerjaan pengembangan minapolitan di Kabupaten Trenggalek dan merupakan komoditas yang akan dibudidayakan di area persawahan kawasan minapolitan Desa Sumurup Kecamatan Bendungan. Sedangkan ikan lele akan dibudidayakan di kolam-kolam milik perorangan di sekitar pekarangan rumah penduduk Desa Sumurup .

b. Penetapan Lokasi Pusat Pengembangan Minapolitan (PPM)

Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Trenggalek tentang penetapan desa minapolitan, dan berdasarkan potensi yang ada akan ditetapkan suatu

kawasan sebagai Pusat Pengembangan Minapolitan (PPM). PPM ini merupakan pusat kegiatan minapolitan dengan dukungan multi kegiatan pendukung, antara lain kegiatan pembenihan ikan, pembuatan pakan alternatif, pengolahan ikan pelayanan keuangan, pelayanan informasi, dan lain-lain. Lokasi PPM sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 188.45/185/406.013/2010 Tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Trenggalek tanggal 2 pebruari 2010. Dimana telah menetapkan Kecamatan Bendungan, Desa Sumurup sebagai lokasi PPM.

c. Kelompok Kerja

Titik berat kegiatan pengembangan kawasan minapolitan ini terdapat di kabupaten/kota. Oleh karena itu diharapkan Bupati/Walikota membentuk POKJA (Kelompok Kerja) Minapolitan Kabupaten/Kota dan wadah sekretariat POKJA untuk membantu melaksanakan peran pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan kawasan minapolitan secara sinergis, mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan. Keanggotaan POKJA ini terdiri dari unsur instansi terkait dan masyarakat seperti Dinas/instansi Perikanan, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perguruan Tinggi, Perbankan, Kadin Kabupaten/Kota, Tokoh Pengusaha/Instansi, Camat, Tokoh Masyarakat dan unsur lainnya yang dianggap penting. Hal serupa juga diharapkan dilakukan pada tingkat provinsi dan tingkat pusat/nasional. POKJA dan wadah sekretariatnya, dengan unsur-unsur sesuai kebutuhan, ditingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan di tingkat nasional

ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai penanggung jawab pembangunan perikanan di tingkat nasional. Disarankan POKJA yang ada di daerah sebaiknya sinkron dengan keanggotaan Dewan Bimas Ketahanan Pangan.

Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/186/406.013/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 telah menetapkan susunan keanggotaan POKJA yang meliputi :

Tabel 7
Pembentukan Kelompok Kerja Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010

1.	Pembina	- Bupati Trenggalek - Wakil Bupati Trenggalek
2.	Pengarah	- Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek - Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Setda Kabupaten Trenggalek - Kepala BAPPEDA Kabupaten Trenggalek
3.	Ketua	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek
5.	Anggota	- Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan Kabupaten Trenggalek - Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek - Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek - Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek - Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek - Kepala Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi Kabupaten Trenggalek - Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Trenggalek - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Trenggalek - Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Trenggalek - Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Trenggalek - Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Trenggalek - Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek - Camat Bendungan - Kepala Desa Sumurup

Sumber : Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Kabupaten Trenggalek Tahun 2010.

B. Penyajian Data Fokus

1. Kebijakan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek

Menurut Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan, konsep minapolitan akan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan minapolitan di daerah-daerah potensial unggulan. Kawasan-kawasan minapolitan akan dikembangkan melalui pembinaan sentra produksi yang berbasis pada sumber daya kelautan dan perikanan. Setiap kawasan minapolitan beroperasi beberapa sentra produksi berskala ekonomi relatif besar, baik tingkat produksinya maupun tenaga kerja yang terlibat dengan jenis komoditas unggulan tertentu.

Dengan pendekatan sentra produksi, sumber daya pembangunan, baik sarana produksi, anggaran, permodalan, maupun prasarana dapat dikonsentrasikan di lokasi-lokasi potensial, sehingga peningkatan produksi kelautan dan perikanan dapat dipacu lebih cepat. Agar kawasan minapolitan dapat berkembang sebagai kawasan ekonomi yang sehat, maka diperlukan keanekaragaman kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi dan perdagangan lainnya yang saling mendukung. Keanekaragaman kegiatan produksi dan usaha di kawasan minapolitan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian setempat dan akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Masa Pra Kebijakan

Sebelum adanya kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya, Desa Sumurup sudah mempunyai pembudidaya dengan komoditas ikan lele. Usaha

budidaya ikan dilakukan secara kecil-kecilan oleh masyarakat Desa Sumurup, hal tersebut disesuaikan dengan kekuatan modal yang ada. Masyarakat Desa Sumurup membudidayakan ikan air di beberapa media seperti kolam dan sawah yaitu dengan menggunakan petakan lahan untuk kolam-kolam lele yang berupa kolam terpal, kolam tanah, dan kolam beton dengan ukuran kolam yang bervariasi. Tanah yang dipakai untuk membuat kolam adalah milik pribadi karena kolam letaknya di samping, depan atau belakang rumah, sedangkan sawah yang dipakai untuk budidaya juga milik pribadi.

Sumber air yang dipakai awalnya berasal dari mata air, pompa hidran dan sungai yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan. Benih ikan juga di dapatkan dari daerah lain, tidak membuat kolam pembenihan sendiri. Sebelum ada kebijakan minapolitan, para pembudidaya menjual hasil panen ikan ke pasar terdekat yaitu ke Pasar Sumurup, hasil panen lainnya bisa dijual ke tetangga terdekat maupun ke daerah terdekat. Para pembudidaya belum menguasai manajemen budidaya ikan secara maksimal dan masih menggunakan teknologi tradisional untuk proses budidaya ikan. Namun dengan adanya kemauan pembudidaya untuk selalu belajar pasti akan meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.



**Gambar 9. Kolam Pembudidaya Aktif Pra Kebijakan
Desa Sumurup Kecamatan Bendungan
dengan Sumber Air Pompa Hidran dari Sungai**

Sumber : Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya
Kabupaten Trenggalek Tahun 2010.

Bupati Kabupaten Trenggalek pada tahun 2009 melakukan survei beberapa lokasi yang mempunyai potensi untuk pengembangan kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya. Lokasi I adalah Desa Karangrejo Kecamatan Kampak, lokasi II Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek, dan lokasi III Desa Sumurup Kecamatan Bendungan. Hasil penetapan lokasi berdasarkan survei lapangan dengan berbagai pertimbangan dan analisis yang dilakukan maka

terpilihlah lokasi III, yaitu Desa Sumurup Kecamatan Bendungan sebagai lokasi pengembangan minapolitan Kabupaten Trenggalek.

Kegiatan pengembangan budidaya perikanan didukung dengan adanya SK Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 188.45/185/406.013/2010 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Trenggalek tanggal 2 Pebruari 2010 telah menetapkan Desa Sumurup Kecamatan Bendungan sebagai lokasi Pusat Pengembangan Minapolitan (PPM). Pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Trenggalek ditetapkan di Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek karena Desa Sumurup sebagai nominasi terkuat yakni karena sumber air di desa itu cukup melimpah sehingga memudahkan diwujudkannya kawasan minapolitan. Program pengembangan kawasan minapolitan adalah pembangunan ekonomi berbasis perikanan yang dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada, utuh dan menyeluruh, berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Potensi perikanan budidaya yang dapat dikembangkan di Kabupaten Trenggalek adalah budidaya ikan nila dan ikan lele di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan sebagai pusat kegiatan minapolitan.

Berbagai program penunjang pelaksanaan kebijakan minapolitan sudah dilaksanakan di Desa Sumurup. Pada tahun 2010 terdapat 50 paket program wirausaha lele dan 10 paket program gakin. Wirausaha lele adalah program tahap awal pembelajaran untuk budidaya ikan. Wirausaha lele yang dilakukan di Desa Sumurup banyak yang berhasil, oleh karena itu proses penerapan kebijakan

minapolitan berbasis perikanan budidaya berjalan dengan lancar karena sebagian besar pembudidaya sudah mengetahui dasar-dasar budidaya ikan melalui program wirausaha lele tersebut.

Tahapan Proses Pelaksanaan Kebijakan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek

a. Analisis Kelayakan Lokasi Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya (Tahun 2010)

Pemilihan lokasi didasarkan atas ketersediaan lahan, kesesuaian lahan serta minaklimatnya, kesiapan prasarana, ketersediaan tenaga kerja serta sumberdaya lain yang membentuk keunggulan lokasi yang bersangkutan (berdasarkan teknik *mapping* dan analisis *carrying capacity*). Pemilihan komoditas utama dan penunjang serta jenis usahanya didasarkan atas potensi menghasilkan keuntungan, potensi pemasarannya, kesiapan dan penerimaan masyarakat atas jenis usaha budidaya ikan yang akan dikembangkan, serta keselarasan dengan kebijakan pembangunan daerah. Untuk menduga unggulan wilayah serta komoditas yang akan dipilih dilakukan analisis kuantitatif dan kualitatif yang memperhatikan faktor-faktor ekonomi dan sosial.



Gambar 10. Pencitraan Awal Lokasi Survei 3 Desa Sumurup

Sumber : Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Kabupaten Trenggalek Tahun 2010.



Gambar 11. Lokasi yang Direncanakan sebagai Kawasan Minapolitan di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan

Sumber : Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Kabupaten Trenggalek Tahun 2010.

1) Penetapan Jenis Komoditas Usaha

Penentuan jenis komoditas unggulan dilakukan didasarkan atas analisis kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan, yang dirinci menurut komponen-komponen penting sistem minabisnis, yaitu target grup, ketersediaan dan kesesuaian lahan, dan prasarannya, ketersediaan sarana produksi, kemampuan pengelolaan budidaya, penanganan pasca panen, pemasaran, dukungan prasarana dan kelembagaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui upaya dan kegiatan yang diperlukan untuk sentra minabisnis, dalam satuan volume yang jelas. Keseluruhan kegiatan tersebut selanjutnya diuraikan menurut tahapan per tahun, disesuaikan dengan kondisi fisik lokasi, kondisi sosial ekonomi serta tingkat kemampuan masyarakat.

2) Penetapan Lokasi Pusat Pengembangan Minapolitan (PPM)

Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Trenggalek tentang penetapan desa minapolitan, maka berdasarkan potensi yang ada akan ditetapkan suatu kawasan sebagai Pusat Pengembangan Minapolitan (PPM). PPM ini merupakan pusat kegiatan minapolitan dengan dukungan multi kegiatan pendukung, antara lain kegiatan pembenihan ikan, pembuatan pakan alternatif, pengolahan ikan pelayanan keuangan, pelayanan informasi, dan lain-lain.

3) Penetapan Lokasi Binaan Luar Kawasan (*hinterland*)

Guna menciptakan inter-koneksi kegiatan ekonomi, maka harus dikembangkan pula lokasi binaan diluar kawasan minapolitan yang disebut

dengan *hinterland*. *Hinterland* merupakan desa tetangga dari lokasi pengembangan minapolitan yang memiliki potensi untuk mendukung terciptanya kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya yang telah ditetapkan. Kegiatan ini akan menghasilkan lokasi-lokasi/desa *hinterland* yang penetapannya dilakukan menurut analisis kelayakan berdasarkan pada kesesuaian fisik lokasi, jarak lokasi dengan pusat kegiatan minapolitan, potensi sumberdaya yang ada (baik manusia maupun sumberdaya alam), serta motivasi masyarakat setempat dalam mendukung usaha budidaya perikanan.

4) Inventarisasi Isu Penting dari Kegiatan

Isu-isu penting serta informasi dasar hasil survei maupun temuan pada kegiatan Koordinasi, Konsultasi, Serta Pengumpulan Data dan Informasi Awal yang melibatkan Instansi Terkait dan *Stakeholders* selanjutnya akan di-inventarisasi untuk kemudian dijadikan bahan evaluasi dan informasi dasar dalam penyusunan rencana strategis kegiatan untuk tahun mendatang. Kegiatan awal yang dilakukan adalah :

- Inventarisasi potensi perikanan budidaya setempat
- Identifikasi kelompok pembudidaya
- Identifikasi minat masyarakat terhadap minapolitan
- Inventarisasi daya dukung lingkungan untuk kegiatan minapolitan

b. Pembuatan Kolam (Tahun 2011)

Ada dua macam/tipe kolam, yaitu bak dan kubangan (kolam galian).

Pemilihan tipe kolam tersebut disesuaikan dengan lahan yang tersedia.

Pengembangan awal di Desa Sumurup membangun 20 kolam dalam kelompok budidaya ikan Nila Harapan. Ukuran 20 kolam tersebut semua sama yaitu 6x10 m, kolam tersebut dibangun di lahan yang dulunya adalah sawah dan kebun warga.

Persiapan Lahan

Proses pengolahan lahan (pada kolam tanah) meliputi :

- Pengeringan. Untuk membersihkan kolam dan mematikan berbagai bibit penyakit.
- Pengapuran. Dilakukan dengan kapur Dolomit atau Zeolit dosis 60 gr/m² untuk mengembalikan keasaman tanah dan mematikan bibit penyakit yang tidak mati oleh pengeringan.
- Perlakuan TON (Tambak Organik Nusantara). Untuk menetralkan berbagai racun dan gas berbahaya hasil pembusukan bahan organik sisa budidaya sebelumnya dengan dosis 5 botol TON/ha atau 25 gr (2 sendok makan)/100m². Penambahan pupuk kandang juga dapat dilakukan untuk menambah kesuburan lahan.
- *Pemasukan Air*. Dilakukan secara bertahap, mula-mula setinggi 30 cm dan dibiarkan selama 3-4 hari untuk menumbuhkan plankton sebagai pakan alami lele.

Pada tipe kolam berupa bak, persiapan kolam yang dapat dilakukan adalah :

- Pembersihan bak dari kotoran/sisa pembenihan sebelumnya.
- Penjemuran bak agar kering dan bibit penyakit mati. Pemasukan air fapat langsung penuh dan segera diberi perlakuan TON dengan dosis sama.



**Gambar 12. Salah Satu Kolam Perikanan Budidaya Desa Sumurup
Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek**

Sumber : Dokumentasi Peneliti

c. Pengisian Benih Ikan Pertama (Tahun 2012)

Ikan nila mudah dipijahkan, tidak seperti jenis ikan introduksi lainnya yang kadang-kadang sulit memijah. Pembenihan ikan nila bisa dilakukan secara alami (tanpa campur tangan manusia). Namun, pemijahan alami tersebut akan menghasilkan benih dalam jumlah yang sedikit sehingga untuk ikan nila dianjurkan menggunakan pemijahan intensif secara massal dengan konsekuensi membutuhkan induk dalam jumlah banyak.

Penyiapan Calon Induk

Calon induk yang akan digunakan sebagai bakalan penghasil bibit ikan nila harus diperhatikan kualitasnya. Banyak induk ikan nila yang ada di masyarakat Kabupaten Trenggalek kualitas genetisnya sudah menurun. Induk yang kualitas genetisnya kurang baik, jika dipijahkan, akan menghasilkan keturunan yang jelek dan kuantitas benihnya rendah. Karena itu, sebaiknya menggunakan induk yang berasal dari institusi yang ditunjuk sebagai penyedia induk.

Induk yang akan digunakan adalah induk yang siap memijah atau bakalan induk yang belum siap memijah. Jika menggunakan induk siap memijah, dana yang disediakan cukup besar karena harganya relatif mahal. Sebaliknya, jika menggunakan bakalan induk, diperlukan waktu pemeliharaan untuk membesarkan bakalan induk hingga mencapai umur dan ukuran siap memijah (matang kelamin).

Tanda-tanda induk yang berkualitas baik sebagai berikut :



Gambar 13. Ikan Nila

- Kondisi sehat.
- Bentuk badan normal.
- Sisik besar dan tersusun rapi.
- Kepala relatif kecil dibandingkan dengan badan.
- Badan tebal dan berwarna mengilap (tidak kusam).
- Gerakan lincah.
- Memiliki respon yang baik terhadap pakan tambahan.

Sumber : Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Kabupaten Trenggalek Tahun 2010.

Jumlah induk yang dibutuhkan untuk usaha pembenihan sangat tergantung dan besar kecilnya target produksi yang akan dicapai. Artinya, semakin tinggi target produksi yang direncanakan, jumlah induk yang dibutuhkan juga semakin banyak. Ikan nila termasuk jenis ikan yang jumlah telurnya relatif sedikit sehingga dari setiap kali pemijahan, larva yang dihasilkan juga sedikit. Induk ikan nila betina yang sudah matang kelamin (umur 5-6 bulan) dengan berat 200-250 gram mengandung telur 500—1.000 butir, dan jumlah telur tersebut bisa dihasilkan 200—400 ekor larva. Untuk pengisian benih ikan per kolam adalah 1000 ekor, benih disediakan dari Dinas sebanyak 26.000 ekor ikan. Pengisian benih ikan ini dilakukan pada pertengahan tahun 2012 yang direncanakan panen pertama pada akhir tahun 2012.

d. Pemberian Pakan Ikan

Manajemen Pakan

- Pakan alami berupa plankton, jentik-jentik, kutu air dan cacing kecil (paling baik) dikonsumsi pada umur di bawah 3 - 4 hari.
- Pakan buatan untuk umur diatas 3 - 4 hari. Kandungan nutrisi harus tinggi, terutama kadar proteinnya.
- Untuk menambah nutrisi pakan, setiap pemberian pakan buatan dicampur dengan POC NASA dengan dosis 1 - 2 cc/kg pakan (dicampur air secukupnya), untuk meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan tubuh karena mengandung berbagai unsur mineral penting, protein dan vitamin dalam jumlah yang optimal.

Manajemen Air

Ukuran kualitas air dapat dinilai secara fisik :

- air harus bersih
- berwarna hijau cerah
- kecerahan/transparansi sedang (30 - 40 cm).

Ukuran kualitas air secara kimia :

- bebas senyawa beracun seperti amoniak
- mempunyai suhu optimal (22 - 26 0C).

Untuk menjaga kualitas air agar selalu dalam keadaan yang optimal, pemberian pupuk TON sangat diperlukan. TON yang mengandung unsur-unsur mineral penting, lemak, protein, karbohidrat dan asam humat mampu menumbuhkan dan menyuburkan pakan alami yang berupa plankton dan jenis cacing-cacingan, menetralkan senyawa beracun dan menciptakan ekosistem kolam yang seimbang. Perlakuan TON dilakukan pada saat oleh lahan dengan cara dilarutkan dan di siramkan pada permukaan tanah kolam serta pada waktu pemasukan air baru atau sekurang-kurangnya setiap 10 hari sekali. Dosis pemakaian TON adalah 25 g/100m².

Manajemen Kesehatan

Kondisi air yang jelek sangat mendorong tumbuhnya berbagai bibit penyakit baik yang berupa protozoa, jamur, bakteri dan lain-lain. Maka dalam manajemen kesehatan pembenihan lele dan nila, yang lebih penting dilakukan adalah penjagaan kondisi air dan pemberian nutrisi yang tinggi. Dalam kedua hal itulah, peranan TON dan POC NASA sangat besar.

Namun apabila anakan lele dan nila terlanjur terserang penyakit, dianjurkan untuk melakukan pengobatan yang sesuai.

e. Pemanenan Pertama (Akhir Tahun 2012)

Benih bisa segera dipanen setelah induk melepaskan benih dari dalam mulutnya. Pemanenan ini harus dilakukan pada saat yang tepat (paling lambat dua hari setelah dikeluarkan dari mulut induk), panen ikan nila dilakukan dalam 6 bulan sekali. Sebaiknya waktu panen yang ideal dilakukan pada pagi hari ketika kondisi oksigen (O₂) dalam jumlah banyak. Hal ini ditandai dengan banyaknya larva yang muncul ke permukaan air kolam, terutama di bagian pinggir kolam. Jika pemanenan terlambat dilakukan, larva sudah berpindah ke arah tengah kolam sehingga sulit untuk ditangkap. Larva yang tertangkap segera dipindahkan ke dalam kolam pendederan.

f. Identifikasi dan Inventarisasi Kebutuhan Lainnya dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan (Tahun 2011 – Tahun 2013)

Kegiatan dengan fokus pada PPM dan *hinterland* ini meliputi :

1) Inventarisasi Kebutuhan Infrastruktur

Meliputi kebutuhan sarana dan prasarana fisik yang mendukung pengembangan minapolitan. Antara lain program pembangunan bangunan fisik kolam budidaya ikan, pembangunan sarana transportasi dengan dukungan prasarana jalan (jalan desa dan jalan ke lokasi budidaya/jalan tani), penyediaan energi yang dibutuhkan berupa listrik,

penyediaan fasilitas pengairan serta pembangunan sarana prasarana pemasaran.

2) Inventarisasi Kebutuhan Usaha Perikanan

- Kebutuhan benih ikan yang akan dibudidayakan;
- Kebutuhan layanan konsultasi pembenihan, teknis budidaya ikan, serta penanggulangan hama dan penyakit ikan;
- Kebutuhan layanan konsultasi usaha pasca budidaya perikanan, termasuk kegiatan pengolahan serta diversifikasi produk olahan perikanan;

- Inventarisasi pasar produk budidaya maupun hasil olahan;

- Pengembangan budidaya;

- Pembinaan pasca panen dan pemasaran;

Peningkatan ketrampilan teknis dalam penanganan pasca panen seperti cara memanen, mengumpulkan dan menyeleksi hasil panen serta peralatan yang diperlukan untuk mempertahankan kualitas hingga cara pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah serta meningkatkan kemampuan pemasaran, khususnya yang menyangkut produk ikan hasil budidaya.

- Pembinaan Pengembangan Usaha Perikanan;

Meliputi pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB), pembentukan Forum Komunikasi Minabisnis (FORKAM), pelaksanaan temu-temu usaha, pelatihan kewirausahaan, dan peningkatan kemampuan penyuluh perikanan sebagai pusat konsultasi dan pelayanan minabisnis.

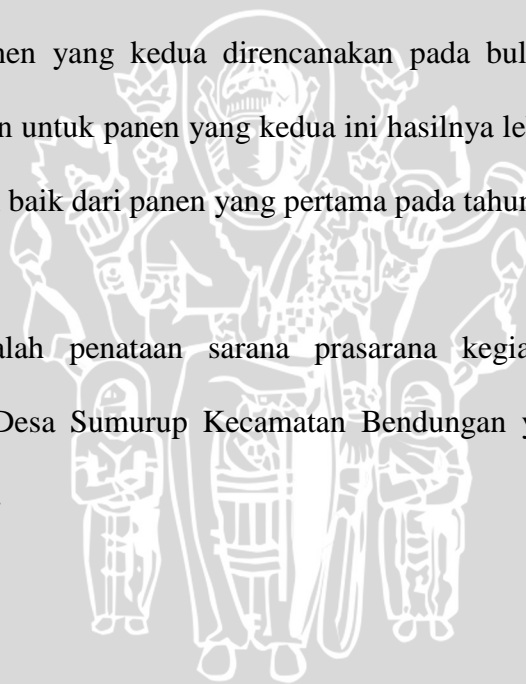
3) Inventarisasi Kebutuhan Usaha non Perikanan

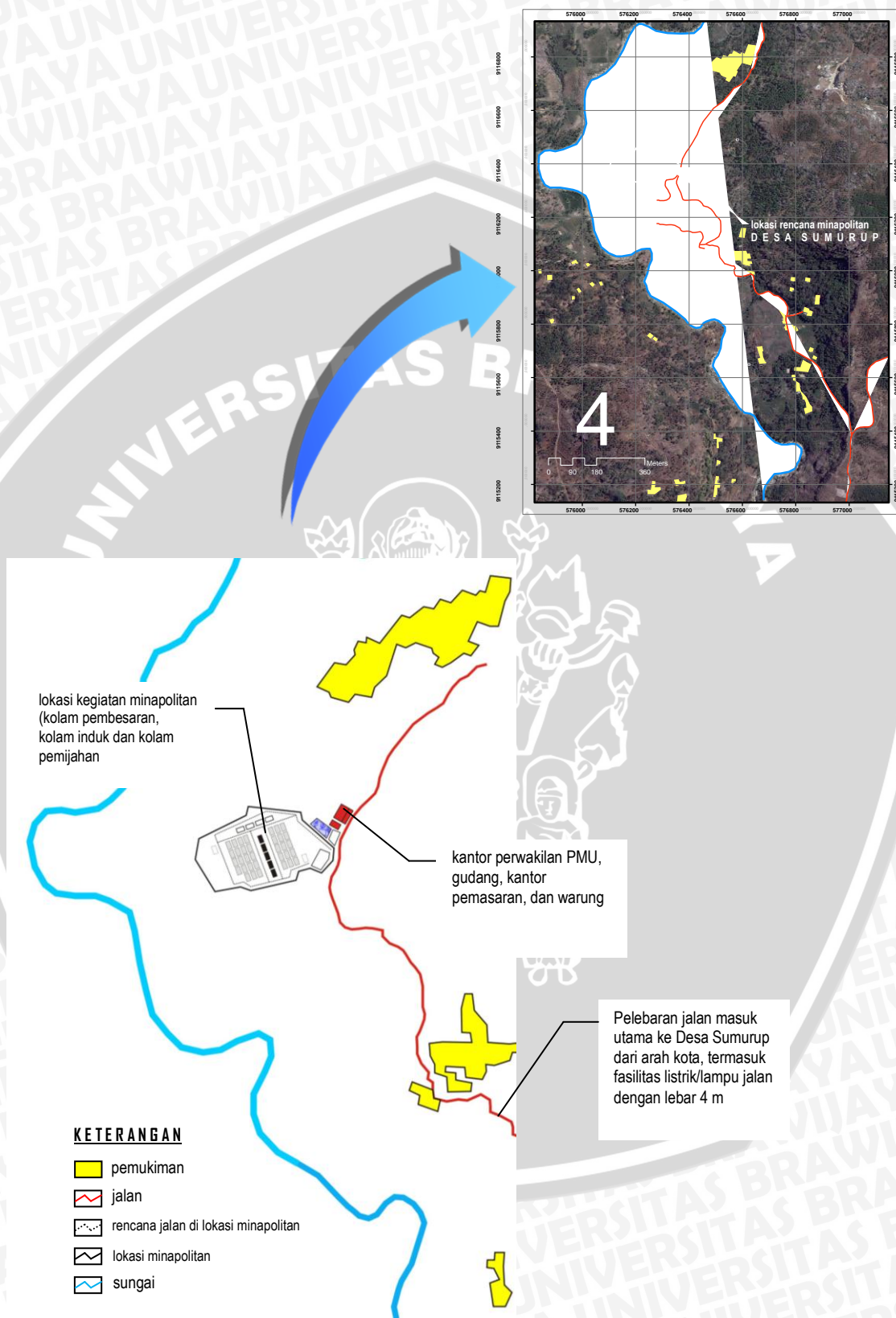
Kebutuhan usaha non perikanan ini meliputi identifikasi dan inventarisasi lembaga keuangan/permodalan daerah. Tersedianya lembaga keuangan dan permodalan sangat penting bagi para pelaku usaha minabisnis ini, sehingga harus diusahakan di lokasi sentra atau lokasi yang sangat mudah dicapai dari kawasan sentra.

g. Pengisian Benih Ikan Kedua (Tahun 2013)

Pengisian benih ikan nila yang kedua yaitu pada bulan Februari tahun 2013, untuk panen yang kedua direncanakan pada bulan Agustus tahun 2013. Diharapkan untuk panen yang kedua ini hasilnya lebih meningkat dan kualitasnya lebih baik dari panen yang pertama pada tahun 2012 kemarin.

Berikut adalah penataan sarana prasarana kegiatan dan rencana pengembangan Desa Sumurup Kecamatan Bendungan yang digambarkan pada Gambar 14.





Gambar 14. Layout Pengembangan Fisik Kawasan PMU Minapolitan di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek

Sumber : Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Kabupaten Trenggalek Tahun 2010.

Dalam kebijakan minapolitan ini untuk pelaksanaan, pemeliharaan, pemasaran hasil perikanan budidaya diorganisir oleh pembudidaya yang dibantu oleh Penyuluh Perikanan Kecamatan Bendungan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek yang memberikan fasilitas kepada para pembudidaya. Dengan mempertimbangkan aspek distribusi dan peluang pasar yang besar untuk minabisnis ikan nila dan ikan lele, maka sasaran pokok atau target yang ingin dicapai untuk menjadikan Kabupaten Trenggalek sebagai sentra pengembangan kawasan minapolitan komoditas ikan nila dan lele adalah :

- a. Pembangunan *Project Management Unit* (PMU) untuk ikan nila di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan dan PMU untuk ikan lele di Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek sebagai institusi yang bertanggungjawab akan keberhasilan pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Trenggalek yang berkelanjutan. PMU nantinya mengkoordinasikan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam hal konsultasi manajemen, teknis budaya dan pengolahan, permodalan, kepastian berusaha dan kepastian pemasaran, termasuk upaya ekspor dalam segar maupun olahan, seperti daging *fillet*.
- b. Pengembangan atau pembangunan infrastruktur di kawasan pengembangan minapolitan, terutama di desa prioritas, yaitu Desa Sumurup Kecamatan Bendungan dan Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek. Sedangkan lokasi kecamatan kawasan pendukung adalah Kecamatan Trenggalek dan Kecamatan Kampak.

- c. Pembentukan dan peningkatan peran kelembagaan dalam pembangunan perikanan, yang meliputi KUB yang sudah ada, Kelompok Usaha Bersama Minabisnis (KUBM) ikan nila atau ikan lele, Koperasi Pembudidaya Ikan nila atau ikan lele/KUD, Penyuluhan Perikanan dan FORKIN (Forum Komunikasi Minabisnis Ikan Nila).
- d. Perbaikan dan peningkatan fasilitas penanganan pasca panen ikan dan sistem pemasaran tradisional.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kebijakan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek.

a. Pemilihan Lokasi

Lokasi yang dipilih untuk pengembangan usaha budidaya perairan peruntukannya harus jelas sehingga tidak berbenturan dengan kepentingan-kepentingan instansi atau lembaga lain di kemudian hari. Peruntukan lahan untuk usaha harus jelas dan pasti, sesuai dengan rencana induk pengembangan daerah setempat. Peruntukan lahan yang jelas ini penting untuk menghindari terjadinya kerugian yang besar di kemudian hari. Pemilihan lahan untuk penerapan kebijakan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek ini sudah dipertimbangkan dengan baik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek menyatakan bahwa:

“...Berdasarkan penggunaan lahan Kabupaten Trenggalek yang dibuat oleh Badan Perencanaan Daerah. Untuk penggunaan lahan, area ladang dan tegalan ataupun lahan kosong daerah terluas itu ya di Kecamatan Bendungan, ini dapat dimanfaatkan secara optimal melalui kegiatan pengembangan minapolitan disana. Alasan lainnya karena daerah ini dilalui sungai besar yang debit air tiap tahunnya sangat mencukupi kebutuhan air untuk keperluan budidaya perikanan di kawasan minapolitan nantinya...”. (Wawancara, hari Senin tanggal 4 Februari 2013 pukul 09.00 WIB, di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek).

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu Bapak Pelopor Petani Desa Sumurup yang menyatakan bahwa:

“...Dari tiga daerah yang sudah dilakukan survei untuk pengembangan minapolitan, akhirnya Kecamatan Bendungan yang cocok. Faktor utamanya ya memang pasokan air yang melimpah, sumber airnya banyak dan tidak mati sepanjang tahun kayak air abadi mbak. Disini juga nggak ada pencemaran air, limbah juga bisa dialirkan ke sawah dan digunakan sebagai pupuk. Selain itu ya karena minat warga sini untuk mengembangkan minapolitan, kalo tidak ada minat ya sulit kedepannya. Warga sini juga banyak yang sudah mengembangkan wirausaha ya buat kolam-kolam ikan lele dideket rumah...”. (Wawancara, hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 pukul 11.00 WIB di Balai Penyuluh Kecamatan Bendungan).

Lokasi budidaya yang dipilih adalah lokasi yang mudah dijangkau. Lokasi budidaya di Desa Sumurup ini berdekatan dengan rumah tempat tinggal warga, hal ini bertujuan supaya lebih mudah dalam pemeliharaan. Lahan yang digunakan untuk membuat kolam adalah lahan atau tanah warga yang dari awalnya sudah berminat untuk mengembangkan kebijakan minapolitan ini. Jadi lahan yang digunakan adalah milik warga sendiri, bukan tanah sengketa maupun tanah milik pemerintah. Sebagian besar lahan yang digunakan untuk pembuatan kolam adalah sawah dan ladang, warga setempat juga sudah sepakat menjadikan sawah serta ladang mereka untuk kegiatan budidaya perikanan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua Pokdakan yang menyatakan bahwa:

“...Lahan yang digunakan disini lahannya warga sendiri, lahan yang dipakai punya warga itu dulunya sawah, tegalan dan lahan pekarangan yang kosong. Pembangunan kolam disini dekat dengan rumah warga, kita mau bolak-balik ke kolam untuk memantau dan ngasih makan ikan itu enak...”. (Wawancara, hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 pukul 12.00 WIB di lokasi minapolitan Desa Sumurup).

b. Tenaga Kerja

Tenaga kerja dalam budidaya ikan di Desa Sumurup ini merupakan faktor yang sangat penting sejajar dengan faktor-faktor penting lainnya. Ada dua macam kategori tenaga kerja, yaitu tenaga kerja biasa dan tenaga kerja khusus (ahli). Tenaga kerja biasa dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan biasa, seperti penggalian, penimbunan, dan sebagainya. Sedangkan tenaga kerja khusus dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu Bapak Pelopor Petani Desa Sumurup yang menyatakan bahwa:

“...Untuk tenaga kerja disini banyak, karena memang lokasi budidayanya berdekatan dengan rumah warga. Tenaga ahli disini juga ada, ya mas penyuluh perikanan itu. Tugasnya ya sebagai teknisi, ahli pakan, ahli penyakit juga, misalnya ada ikan yang sakit dikasih tahu apa saja obat yang harus dikasihkan...”. (Wawancara, hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 pukul 11.00 WIB di Balai Penyuluh Kecamatan Bendungan).

Semua pekerjaan tenaga kerjalah yang paling menentukan, dalam budidaya perikanan ini semua pekerjaan dikerjakan secara kelompok. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Pokdakan bahwa:

“...Untuk mengelola budidaya ini dibentuk kelompok, anggota kelompok ada 10 orang. Biasanya jika ada kabar baru dari Dinas untuk ditindaklanjuti ya saya menghubungi anggota kelompok, karena memang rumahnya banyak yang dekat jadi gampang ngajak mereka ngumpul untuk musyawarah. Kami biasanya selalu bersama-sama dalam mengelola budidaya perikanan ini, jadi

sama rata ya sama tau informasi terbarunya...”. (Wawancara, hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 pukul 12.00 WIB di lokasi minapolitan Desa Sumurup).

c. Sarana dan Prasarana Transportasi

Lokasi budidaya sebaiknya berdekatan dengan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai untuk mempermudah dalam pengangkutan bahan, benih, hasil panen, dan pemasarannya. Untuk sarana transportasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek memberikan bantuan tiga buah motor plat merah. Motor ini dimanfaatkan untuk kelancaran pelaksanaan budidaya perikanan dan memudahkan pedagang (bakul) untuk mengambil hasil panen dan pemasaran ikan ke pasar. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu pedagang (bakul) ikan yang menyatakan bahwa:

“...Saya dapat bantuan motor dari Dinas untuk wira-wiri angkut hasil panen yang saya jual ke pasar. Kalau pakai motor sendiri kadang motornya dipakai untuk keperluan lain, jadi bisa menghambat jualan saya. Motor dari Dinas ini ya memang dikhususkan untuk angkut-angkut benih, ambil hasil panennya warga sini juga, dan saya pakai jualan ke pasar tiap harinya...”. (Wawancara, hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 pukul 15.00 WIB di Dusun Winong Desa Sumurup).

Sarana transportasi harus memadai, hal ini penting untuk menekan pengeluaran biaya yang sangat besar serta waktu pengangkutan bibit ikan dan hasil panen ikan ke lokasi harus seefisien mungkin. Faktor lain yang mempengaruhi lancarnya transportasi adalah kondisi jalan. Kondisi jalan menuju lokasi budidaya perikanan yang sempit dan tidak begitu lebar yang selama ini dikeluhkan masyarakat Desa Sumurup. Jika ada panen besar mobil pengangkut ikan tidak berani melewati jalan yang menuju ke lokasi budidaya, karena struktur jalan yang tidak kuat menopang beban yang berat. Hal ini seperti yang

diungkapkan oleh salah seorang Penyuluh Perikanan Kecamatan Bendungan, bahwa:

“...Sebenarnya jalan utama dari lokasi ke tempat pemasaran ikan tidak begitu jauh, lokasi ini kan dari jalan utama masih masuk-masuk lagi, dari jalan utama yang sudah diperbaiki dan diaspal sekitar 710 m. Kalau pakai motor ya enak karena masih bisa dijangkau, tapi ya jaga-jaga kalo ada panen besar mobil/truk yang mau angkut dan bawa beban berat belum berani, karena kapasitas jalannya memang seperti ini. Tapi mengenai masalah kondisi jalan tahun ini akan segera diperbaiki karena memang penting untuk lancarnya transportasi...”. (Wawancara, hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 pukul 13.00 WIB di Dusun Winong Desa Sumurup).

d. Alat dan Bahan

Tersedianya alat dan bahan di sekitar lokasi budidaya perikanan bisa menunjang kelancaran pengembangan minapolitan dan bisa menekan biaya. Alat dan bahan tidak hanya dibutuhkan atau digunakan pada awal usaha, tetapi selama usaha berlangsung, maka perlu disediakan dalam jumlah yang cukup sehingga sewaktu-waktu langsung diambil. Untuk itu perlu disediakan gudang khusus untuk menyimpan alat dan bahan tersebut. Dalam budidaya perikanan di Desa Sumurup ini warga yang sudah tergabung menjadi satu kelompok membuat gudang/rumah mesin. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu Bapak Pelopor Petani Desa Sumurup yang menyatakan bahwa:

“...Untuk penyimpanan alat-alat dan bahan selama ini kan di rumah ketua kelompok. Setelah musyawarah akhirnya disepakati untuk membuat gudang sendiri, banyak yang mendukung ya terus kami urunan disini sampai terkumpul 6 juta. Gudang atau rumah mesin ini masih dalam proses, dan untuk dana yang hanya 6 juta itu kami rasa masih sangat kurang...”. (Wawancara, hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 pukul 11.00 WIB di Balai Penyuluh Kecamatan Bendungan).

Untuk menunjang kegiatan budidaya perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek memberikan alat-alat sebagai berikut :

Tabel 8
Daftar Alat Penunjang Perikanan Budidaya

No.	Nama Alat	Jumlah
1.	Pompa air	1
2.	Timbangan	1
3.	Keranjang	1
4.	Mesin pelet	1
5.	Box fiber 2100 liter	5
6.	Kolam <i>knockdown</i> bongkar pasang	5
7.	Diesel	1

Sumber : Data yang diolah

Penggunaan bahan lokal dari penduduk setempat juga bisa dimanfaatkan dengan baik, seperti daun talas yang digunakan sebagai tambahan pakan ikan.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Pokdakan bahwa:

“...Masalah bahan yang digunakan untuk pakan ikan itu kalo disini ya pakai daun talas/lompong. Daun talas disini banyak, waktu awal dicoba untuk pakan ikan ternyata ikannya mau, akhirnya ya terus dilanjutkan oleh warga disini. Sudah banyak yang tahu kalau daun talas bisa digunakan sebagai pakan ikan...”. (Wawancara, hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 pukul 12.00 WIB di lokasi minapolitan Desa Sumurup).

e. Harga dan Pasar

Pasar sangat penting untuk kelangsungan produksi, hasil panen ikan langsung dijual ke pasar oleh pedagang (bakul). Ada tiga pedagang (bakul) yang memasarkan hasil panen untuk budidaya perikanan di Desa Sumurup. Ketiga pedagang (bakul) ini adalah Ibu Sri Wahyuni, Bapak Malik dan Bapak Eko.

Untuk kelancaran pemasaran ikan ketiga pedagang (bakul) ini yang diberikan bantuan berupa motor oleh Dinas Kelautan dan Pertanian Kabupaten Trenggalek. Sedangkan untuk daerah pemasaran ikan, ketiga pedagang (bakul) ini memasarkan ikan di pasar yang berbeda. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu pedagang (bakul) di Desa Sumurup yang menyatakan bahwa:

“...Saya salah satu bakul disini, sama Pak Malik dan Pak Eko. Awalnya ya belum tau masalah gimana trik pemasarannya, tapi dikasi tau sama mas penyuluh tentang cara-caranya jadi sekarang sudah bisa. Yang pertama kami ambil dari petani/pembudidaya disini, terus langsung kami jual ke pasar. Pemasaran ikan ya tiap hari, kalo saya jualnya di Pasar Gempleng dan Jarakan, Pak Eko di Pasar Subuh dan Pak Malik di Pasar Jarakan dan Tugu. Kami pakai motor dari Dinas untuk pemasaran ikan ini, tapi kadang itu diliatin soalnya kan motornya plat merah jadi mikirnya kenapa kluyuran sampai pasar, tapi sebenarnya motornya itu ada tulisannya Kendaraan Operasional Pemasaran Ikan Segar Kabupaten Trenggalek...”. (Wawancara, hari Jum’at tanggal 8 Februari 2013 pukul 15.00 WIB di Dusun Winong Desa Sumurup).

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang Penyuluh Perikanan Kecamatan Bendungan, bahwa:

“...Awalnya itu saya yang memasarkan ikan disini, tapi ya selanjutnya saya memberikan pengarahan untuk menumbuhkan jiwa bisnis kepada pembudidaya. Dan akhirnya ada tiga warga sini yang saya rasa bisa memasarkan ikan, sampai saat ini sudah lumayan berhasil. Sedangkan untuk bantuan motor itu memang tujuannya supaya bakul-bakul ini lancar dalam pemasaran ikan...”. (Wawancara, hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 pukul 13.00 WIB di lokasi minapolitan Desa Sumurup).

Dalam masalah harga ikan, untuk ikan lele per kilonya adalah Rp 12.200,- dari petani / pembudidaya. Kemudian untuk harga jual ke pasar dari pedagang (bakul) adalah Rp 14.000,- per kg. Sedangkan untuk harga ikan nila masih dibawah harga ikan lele yaitu Rp 12.000,- per kg. Ketiga pedagang (bakul) di Desa Sumurup ini selalu memantau perubahan dan perkembangan harga yang terjadi di pasar. Jadi pedagang (bakul) bisa mengantisipasi dan menganalisis harga

jual untuk memperhitungkan keuntungan yang akan didapat. Gambaran sistem pemasaran disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 9
Gambaran Sistem Pemasaran Benih Ikan Nila dan Nila Konsumsi

Sistem Pemasaran	Persentase Ikan Nila			
	Cara pemasaran	Daerah pemasaran	Lembaga pembeli dominan	Konsentrasi pasar
Sistem Pemasaran Benih	Tebasan (0 %)	Lokal (0 %)	Pedagang Pengumpul	Pedagang Pengumpul
	Ijon (0 %)	Dalam Kabupaten (70 %)		
	Kontrak (0 %)	Luar Kabupaten (30 %)		
	Satuan Ekor (100 %)	Ekspor (0 %)		
Sistem Pemasaran Ukuran Konsumsi	Cara pemasaran	Daerah pemasaran	Lembaga pembeli dominan	Konsentrasi pasar
	Tebasan (0 %)	Lokal (5 %)	Pedagang Pengumpul	Pedagang Pengumpul
	Ijon (0 %)	Dalam Kabupaten (30 %)		
	Kontrak (0 %)	Luar Kabupaten (65 %)		
Satuan Berat (100 %)	Ekspor (0 %)			

Sumber : Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Kabupaten Trenggalek Tahun 2010.

Tabel 10
Gambaran Sistem Pemasaran Ikan Lele Konsumsi

Sistem Pemasaran	Persentase Ikan Lele			
	Cara pemasaran	Daerah pemasaran	Lembaga pembeli dominan	Konsentrasi pasar
Sistem Pemasaran Ukuran Konsumsi	Tebasan (0 %)	Lokal (15 %)	Pedagang Pengumpul	Pedagang Pengumpul
	Ijon (0 %)	Dalam Kabupaten (35 %)		
	Kontrak (0 %)	Luar Kabupaten (50 %)		
	Satuan Berat (100 %)	Ekspor (0 %)		

Sumber : Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Kabupaten Trenggalek Tahun 2010.

Tabel di atas menjelaskan sistem pemasaran yang ada di Desa Sumurup. Untuk sistem pemasaran menggunakan ukuran konsumsi, cara pemasaran yang dilakukan menggunakan satuan berat. Untuk daerah pemasaran lebih banyak di luar kabupaten, untuk daerah lokal juga ada yang dikonsumsi oleh warga sekitar lokasi budidaya. Sedangkan untuk daerah dalam kabupaten yaitu melalui ketiga pedagang (bakul) yang memasarkan ikan di pasar-pasar. Lembaga pembeli dominan serta konsentrasi pasar yang dilakukan selama ini hanya melalui pedagang (bakul) dan langsung ke pengumpul.

f. Keamanan Usaha

Dalam budidaya peikanan, faktor keamanan usaha sangat penting. Usaha budidaya harus aman, baik dari gangguan hama dan penyakit maupun tangan-tangan jahil. Untuk masalah gangguan hama atau penyakit warga sudah tahu bagaimana mengantisipasinya, dari awal Penyuluh Perikanan Kecamatan Bendungan sudah memberikan sosialisasi mengenai masalah ini. Penyuluh Perikanan selain sebagai tim teknis juga merangkap sebagai mantri perikanan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua Pokdakan yang menyatakan bahwa:

“...Biasanya disini kalo awal musim hujan mesti banyak penyakit. Biar ndak banyak ikan yang mati ya dikasih obat-obatan tradisional yang ternyata gampang dicari disini. Mas penyuluh yang ngasih tahu kalau ternyata palawija bisa dipakai sebagai obat, seperti kunyit yang diparut dan lengkuas juga bisa. Yang lainnya bisa digunakan sebagai obat itu daun pepaya sama daun bawang merah. Jadi selain obat-obatan yang dijual di toko-toko langkah awal yang dilakukan warga sini ya memakai obat tradisional dulu, dan tidak lupa selalu memberikan vitamin juga...”. (Wawancara, hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 pukul 13.00 WIB di lokasi minapolitan Desa Sumurup).

Sedangkan untuk masalah keamanan area budidaya perikanan ini warga Desa Sumurup menerapkan sistem siskamling, mereka berusaha menjaga sendiri secara bergantian. Warga juga membuat pos keamanan di dekat gudang/rumah mesin. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu Bapak Pelopor Petani Desa Sumurup yang menyatakan bahwa:

“...Kami sadar bahwa keamanan usaha itu sangat penting, jadi kami disini membuat pos keamanan sendiri untuk menjaga lokasi budidaya perikanan ini. Untuk sistemnya ya tiap hari bergantian yang berjaga, warga juga sering kumpul-kumpul di pos untuk ngobrol sekalian berjaga...”. (Wawancara, hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 pukul 11.00 WIB di Balai Penyuluh Kecamatan Bendungan).

g. Partisipasi dan Kemitraan

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk partisipasi dalam kebijakan minapolitan ini semua warga yang terlibat dalam kelompok petani budidaya perikanan mempunyai hak yang sama. Jika ada suatu masalah yang perlu dipecahkan warga melakukan rapat dan berusaha mencari jalan keluar dan semua berhak untuk memberikan pendapatnya sampai akhirnya tercapai suatu keputusan yang terbaik. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu pembudidaya, bahwa :

“...Untuk partisipasi kelompok disini biasanya jika ada pertemuan kalo ada ide dan masukan ya langsung diutarakan kepada Dinas mbak, soalnya kan disini yang sudah terjun ke lapangan untuk wirausaha awal jadi ya tahu masalah yang di lapangan. Istilahnya saling memberi dan menerima seperti itu mbak. Misalnya hanya ketua kelompok yang dipanggil untuk mewakili malamnya selalu diberitahukan ke anggota, jadi semua anggota tahu informasinya, misalnya ada masalah ya dimusyawarahkan bersama sampai nemu hasil baiknya...”. (Wawancara, hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 pukul 13.00 WIB di lokasi minapolitan Desa Sumurup).

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Pokdakan, bahwa :

“... Kalo masalah pembagian tugas disini tu rata ya semua sama ikut kerjasama, jadi tidak ada beda. Jika ada program baru pertemuan pertama kan saya sebagai wakilnya, nanti malamnya gitu ada pertemuan untuk bahas masalah itu, semua bisa ngasih saran gimana baiknya. Dikelompok ini jika butuh untuk kepentingan bersama biasanya diambil dari uang kas yang sudah kami kumpulkan bersama-sama...”. (Wawancara, hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 pukul 13.00 WIB di lokasi minapolitan Desa Sumurup).

Kemitraan adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan. Dalam budidaya perikanan di Desa Sumurup ini untuk kemitraan dilakukan oleh petani/pembudidaya dan pedagang (bakul). Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang Penyuluh Perikanan Kecamatan Bendungan bahwa:

“...Untuk timbal balik benih dilakukan oleh ketiga bakul yang bermitra dengan petani-petani yang kekurangan pakan, nanti dicarikan dan dipotong sama hasil panennya. Sekarang kemitraan lebih bagus, mitra sama orang sini saja sudah cukup, jadi bakulnya enak bisa untung dari pakan, benih, dan penjualan ikannya. Sedangkan enaknya petani karena ikannya akan selalu terjual semua...”. (Wawancara, hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 pukul 11.00 WIB di lokasi minapolitan Desa Sumurup).

3. Evaluasi Kebijakan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Desa Sumurup Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek

a. Efektifitas dari Kebijakan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya

Efektifitas dari suatu kebijakan dapat diukur dari keterkaitan dengan apakah tujuan kesejahteraan suatu kebijakan publik itu tercapai. Melalui pertanyaan terbuka yang disampaikan kepada petani/pembudidaya ikan di Desa Sumurup,

peneliti menemukan alasan mengapa petani/pembudidaya memilih menjalankan budidaya ikan di Desa Sumurup. Adapun alasan salah satu petani adalah sebagai berikut:

“...Saya disini awalnya ya petani biasa mbak, alasan kenapa saya ini sekarang juga jadi pembudidaya ikan ya karena dengan budidaya ini bisa menambah penghasilan. Biasanya kalau tiap hari ke sawah ya sudah begitu saja itu bisa bosan, jadi pembudidaya ikan ini bisa sebagai mata pencaharian baru mbak. Untuk menjalankan budidaya ini juga gampang tidak selalu terikat oleh waktu...”. (Wawancara, hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 pukul 13.00 WIB di lokasi minapolitan Desa Sumurup).

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu Bapak Pelopor Petani Desa Sumurup, bahwa:

“...Kebanyakan warga disini ini ya petani mbak, tiap hari ke sawah dan ke tegalan juga. Awalnya memang warga sini sudah ada yang melakukan wirausaha buat kolam-kolam lele di sekitar rumah. Waktu panen ya uangnya kan bisa buat nambah pendapatan to mbak selain dari hasil panen yang di sawah di tegalan. Jadi pembudidaya ikan ini bisa santai juga mbak, bisa dilakukan kapan saja waktu longgar juga banyak...”. (Wawancara, hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 pukul 13.00 WIB di lokasi minapolitan Desa Sumurup).

Selanjutnya penjelasan dari Ketua Pokdakan sebagai berikut :

“...Saya petani mbak dan dipilih warga untuk jadi ketua Pokdakan, awalnya ada budidaya ini kan memang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek yang melakukan survey pemilihan lokasi. Akhirnya warga disini banyak yang berminat juga, soalnya kalo dibandingkan dengan hasil dari sawah saja hanya sedikit, lebih banyak untuk hasil budidaya ikan ini. Jadi saya juga minat untuk jadi pembudidaya ikan, hasilnya lumayan buat nambah penghasilan. Untuk mengelolanya tidak menyulitkan mbak karena setelah dari sawah masih bisa dilakukan...”. (Wawancara, hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 pukul 11.00 WIB di lokasi minapolitan Desa Sumurup).

Dari jawaban-jawaban informan tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan warga yang awalnya petani dan akhirnya juga menjalankan usaha budidaya perikanan ini adalah bertambahnya penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil panen ikan. Selain itu pembudidaya nyaman dengan melakukan budidaya

perikanan ini karena mereka bekerja tidak terikat oleh waktu, pengelolaannya bisa dilakukan kapan saja. Jadi budidaya perikanan yang dilakukan tidak memberatkan petani karena awalnya mereka sudah berminat dengan kebijakan minapolitan ini.

b. Efisiensi dari Kebijakan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan (perbandingan *output* dan *input*). Dalam evaluasi kebijakan efisiensi punya makna yakni membandingkan antara input (masukan) dari suatu kebijakan dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan) kebijakan. Sedang pertanyaan yang bisa dipakai untuk mempermudah mengidentifikasi efisiensi dari kebijakan publik yakni “Apakah hasil yang diinginkan tercapai?”

Salah satu indikator yang dipakai peneliti untuk mengukur nilai efisiensi dari kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup ini adalah perbandingan manfaat penggunaan lahan, yaitu antara lahan yang dimanfaatkan untuk sawah dan lahan yang dimanfaatkan sebagai kolam untuk budidaya perikanan. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pokdakan, yang menjelaskan bahwa:

“Kalau masalah penghasilan yang didapat ya besaran budidaya ikan daripada hasil panen padi atau ketela di sawah. Modal yang dikeluarkan sama hasil yang didapat antara keduanya itu kami hitung-hitung pendapatan bersihnya tetep besaran dari budidaya ikan. Awalnya saya pernah mencoba budidaya ikan lele sekitar 1000 ekor dan untuk tiga bulan sudah dapat Rp 700.000,- Kalau misal saya tanami ketela tiga bulan belum tentu saya dapat Rp 200.000,-. Cuma

bedanya kalau untuk usaha budidaya perikanan ini modal awal harus ada, kalau modal besar mau budidaya yang besar sekalipun bisa mbak...”. (Wawancara, hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 pukul 11.00 WIB di lokasi minapolitan Desa Sumurup).

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu pembudidaya bahwa :

“...Hasil dari budidaya ikan memang lebih banyak mbak, untuk kolam di depan sama di belakang rumah saya ini isinya per kolam 1000 ikan lele, untuk sekali panen dapat sekitar Rp 1.500.000,- itu sudah dikurangi sama pembelian pakan dan pemeliharaan selama 3 bulan mbak...”. (Wawancara, hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 pukul 11.00 WIB di lokasi minapolitan Desa Sumurup).

Tabel 11
Perkembangan Nilai Produksi Komoditas Unggulan yang di-Andalkan
KabupatenTreggalek

No.	Komoditas	Nilai (total) Produksi (Rp.) / Tahun*			Ket.
		2010	2011	2012	
1.	Lele	3.600.000	900.000.000	929.250.000	
2.	Nila			11.000.000	

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan produksi ikan lele setiap tahun meningkat, hal tersebut secara otomatis bisa menambah penghasilan para pembudidaya ikan. Tahun 2010 merupakan awal pengembangan wirausaha pemula perikanan budidaya, untuk minapolitan sendiri komoditas unggulan adalah ikan nila dan produksi awal yaitu panen pertama pada tahun 2012, untuk panen yang kedua pada pertengahan tahun 2013.

Sedangkan untuk menjelaskan perbandingan manfaat penggunaan lahan, yaitu antara lahan yang dimanfaatkan untuk sawah dan lahan yang dimanfaatkan sebagai kolam untuk budidaya perikanan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 12
Perbandingan Manfaat Penggunaan Lahan

Perbandingan	Analisa
Lahan 6x10 m untuk tanaman padi	Lahan 6x10 m → 1 kw padi = Rp 450.000,-
Lahan 6x10 m untuk kolam budidaya ikan	Lahan 6x10 m / 1000 ekor ikan → 2 kw = Rp 2.400.000,- (jika per kg isi 5 ekor ikan dan harga per kg ikan nila adalah @ Rp 12.000,-)

Sumber : Data yang diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat sangat jauh perbandingan hasil yang diperoleh dari lahan yang dimanfaatkan untuk sawah dan lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya ikan. Untuk lahan 6x10 m yang dimanfaatkan untuk menanam padi hasilnya sekali panen adalah 1 kw dengan hasil Rp 450.000,- (belum dikurangi untuk benih dan pupuk). Sedangkan untuk lahan 6x10 m yang dimanfaatkan untuk budidaya perikanan hasilnya sekali panen adalah 2 kw jika dalam penjualannya 1 kg isi 5 ekor ikan hasilnya adalah Rp 2.400.000,- (belum dikurangi untuk benih dan pupuk). Hasil ini belum diakumulasikan berapa kali panen dalam setahunnya. Biasanya padi 3x panen dalam setahun, untuk ikan nila 2x panen dalam setahun. Dari penjelasan di atas sangat jelas warga Desa Sumurup lebih banyak memilih untuk menjalankan usaha budidaya perikanan daripada memanfaatkan lahan dan sawah mereka untuk pertanian.

c. Kecukupan dari Kebijakan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya

Salah satu indikator yang dipakai peneliti untuk mengukur nilai kecukupan dari kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup ini adalah mengenai standar penunjang yang disesuaikan dengan Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Kabupaten Trenggalek Tahun 2010. Standar penunjang tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 13
Standar Penunjang Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya
Kabupaten Trenggalek

No.	Standarisasi	Ada/ Tidak ada	Jumlah	Kondisi			Ket.
				Baik	Sedang	Buruk	
1.	Jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor	Ada	2		√		Tidak layak
2.	Tempat parkir	Ada	1			√	Tidak layak
3.	Posko keamanan/poskamling	Ada	1	√			Layak
4.	Kios (pemasaran ikan)	Ada	3	√			Layak
5.	Papan nama	Ada	4	√			Layak
6.	Gudang	Ada	1			√	Tidak layak

Sumber : Data yang diolah

Dari tabel diatas dapat diamati bahwa ada 6 standar penunjang yang disesuaikan dengan Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Kabupaten Trenggalek Tahun 2010. Jumlah sarana jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor sebanyak 2 dalam kondisinya cukup baik dan kurang layak dipergunakan, ini dikarenakan terjadinya kerusakan aspal pada jalan keluar masuk

bagian utara. Sedangkan untuk jalan keluar masuk yang dari selatan sudah diperbaiki sepanjang 710 m. Sampai saat ini jalan yang rusak belum diperbaiki, namun Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek sudah sering melakukan survei melihat keadaan jalan. Rencananya pada tahun 2013 ini perbaikan jalan akan segera direalisasikan.

Dalam Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 tempat parkir rencananya akan dibangun, namun sekarang masih belum dibangun tempat parkir yang nyaman. Jadi untuk parkir masih disekitar tepi jalan dekat dengan lokasi minapolitan. Disekitar lokasi minapolitan terdapat 1 posko keamanan (poskamling) yang dibangun oleh kelompok minapolitan Desa Sumurup. Dibangunnya poskamling ini berdasarkan ide dan kemauan kelompok sendiri.

Jumlah kios (pemasaran ikan) ada 3 dan kondisinya baik serta layak untuk dipergunakan, terdapat kios yang cukup aktif dalam kegiatannya yaitu kios Mbak Sri Wahyuni. Papan nama berjumlah 4, yang 3 adalah papan nama kios yang terletak di depan kios, sedangkan papan nama yang satunya adalah papan nama kolam minapolitan. Papan nama tersebut cukup jelas, jadi warga dapat dengan mudah menemukan lokasi kios dan kolam minapolitan ini. Penunjang yang terakhir ada 1 gudang sebagai tempat penyimpanan alat dan bahan budidaya perikanan. Pembangunan gudang ini masih dalam proses dan letak gudang ini berada didekat poskamling, tujuannya adalah kemudahan dalam memantau keamanan dari isi gudang tersebut.

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup ini warga dan pembudidaya serta aktor lain yang terkait cukup memperhatikan pengelolaannya.

Masalah standarisasi dari Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 ini sudah dijelaskan dalam tabel. Namun dalam prosesnya masih terdapat masalah mengenai kurangnya dana untuk pembangunan gudang (rumah mesin). Hal ini seperti yang dijelaskan oleh salah satu Bapak Pelopor Petani Desa Sumurup, bahwa:

“...Warga disini sadar akan keamanan juga, awalnya bantuan dari Dinas ini ditempatkan di rumah Ketua Pokdakan. Tapi jika bantuan alat-alat bertambah nanti bingung lagi akan ditempatkan dimana, kasihan kalau selalu ditempatkan di rumah Pak Ketua. Jadi warga sini punya inisiatif membangun gedung (rumah mesin) dengan dana yang dikumpulkan sendiri, namun masalahnya ternyata dana untuk membangun gudang itu kurang. Oleh karena itu gudang yang dibangun belum selesai dan belum bisa digunakan...”. (Wawancara, hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 pukul 13.00 WIB di lokasi minapolitan Desa Sumurup).

d. Perataan dari Kebijakan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya

Indikator yang dipakai peneliti untuk mengukur nilai perataan dari kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup ini adalah mengenai biaya manfaat yang didistribusikan kepada pembudidaya dan ancaman keberadaan kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup. Melalui pertanyaan terbuka peneliti mendapatkan informasi apakah biaya manfaat yang didistribusikan merata kepada pembudidaya. Berikut ini jawaban dari Ketua Pokdakan, yang menyatakan bahwa:

“...Bantuan penunjang program minapolitan yang diberikan kepada kepala keluarga tidak sama, tapi untuk program penunjang awal yang 50 paket itu sama. Namun selanjutnya tidak sama, karena tergantung pada programnya dan minat warga sini, sebelumnya ya didata siapa saja yang ingin mendapatkan kolam dan siapa yang ingin mendapatkan pakan dan benih. Setelah dilakukan pendataan selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek untuk ditindaklanjuti...”. (Wawancara, hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 pukul 13.00 WIB di lokasi minapolitan Desa Sumurup).

Jawaban lain diungkapkan oleh salah seorang Penyuluh Perikanan Kecamatan

Bendungan, bahwa:

“...Kalau kebijakan minapolitan ini rata untuk 1 Kelompok Nila Harapan, karena memang yang mempunyai lahan ya kelompok ini dan pembangunan kolam dilakukan serentak. Awalnya ketika diadakan sosialisasi kelompok ini minat dan akhirnya langsung ditindaklanjuti. Kalau misalnya tidak ada yang minat ya kebijakan ini tetap bisa dilaksanakan di Desa Sumurup tetapi bedanya harus ngurus tanah-tanah milik warga disini. Jika selanjutnya warga melihat 20 kolam awal ini berhasil dan mereka minat serta meminta menerapkannya ya nanti saya rekomendasikan ke Dinas untuk pengembangan kebijakan minapolitan lagi...”. (Wawancara, hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 pukul 13.00 WIB di lokasi minapolitan Desa Sumurup).

Indikator lainnya adalah mengenai ancaman keberadaan kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup. Hal ini seperti yang dijelaskan Ketua Pokdakan, bahwa:

“...Selama ini belum pernah ada warga yang mengeluh tentang kerugian atau gangguan dari pembangunan kolam untuk budidaya perikanan di Desa ini. Kami tidak merasa rugi karena memang dari awal sudah mempertimbangkan dengan baik adanya kebijakan ini mbak. Biasanya air dari kolam dialirkan ke sawah warga sini, itu bisa dibuat pupuk mbak, jadi malah enak bisa menyuburkan tanaman...”. (Wawancara, hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 pukul 14.00 WIB di lokasi minapolitan Desa Sumurup).

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu Bapak Pelopor Petani Desa Sumurup, bahwa:

“...Masalah merugikan atau mengancam lingkungan disini itu enggak mbak. Warga disini soalnya memang banyak yang mendukung kebijakan ini, dari awalnya saja sudah banyak warga sini yang wirausaha ikan juga. Masalah bau

juga jarang terjadi soalnya air mengalir terus dan warga sini selalu memperhatikan masalah pergantian air juga. Soalnya rumah-rumah warga sini berdekatan, dan banyak yang mempunyai kolam di depan rumah samping rumah dan belakang rumah juga, kalau misalkan tidak memperhatikan pergantian air yang dirugikan juga yang punya kolam itu sendiri kan baunya akan mengganggu...”. (Wawancara hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 pukul 11.00 WIB di lokasi minapolitan Desa Sumurup).

Dari jawaban-jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk program penunjang minapolitan bantuan tidak merata, karena bantuan yang diberikan berdasarkan pada program dan minat warga. Sedangkan untuk kebijakan minapolitan bantuan yang diberikan merata karena pembangunan kolam dilakukan secara serentak. Selanjutnya mengenai ancaman keberadaan kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup warga tidak merasa terancam dan tidak merasa dirugikan. Banyak warga yang dari awal sudah mendukung kebijakan ini dan ada yang sudah melakukan wirausaha ikan juga, selain itu warga sudah paham mengenai pergantian air untuk mengantisipasi bau kolam yang dapat merugikan warga sekitar.

e.Responsivitas dari Kebijakan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya

Responsivitas diartikan sebagai kemampuan untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan seluruh rakyat di suatu negara. Dalam hal ini responsivitas merupakan cara yang efisien dalam *manage* atau mengatur urusan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah atau lokal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup sebagai lembaga atau wadah adalah dari Balai Benih Perikanan

Kabupaten Trenggalek, Penyuluh Perikanan Kecamatan Bendungan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Balai Benih Perikanan adalah sebagai penyedia benih, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek yang menyatakan bahwa:

“...Untuk masalah benih sebenarnya sudah disediakan oleh Balai Benih mbak, karena memang Balai Benih adalah sebagai penyedia benih, ada lele, gurami, dan nila. Namun jika stok benih habis biasanya warga mencari benih sendiri, bisa dibantu penyuluh dan bakul juga dalam mencari benih. Untuk mendapatkan benih bisa dari luar Trenggalek biasanya benih dari Tulungagung...”. (Wawancara hari Senin tanggal 4 Maret 2013 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek).

Peran dari Penyuluh Perikanan Kecamatan Bendungan juga sangat banyak dalam membantu kelancaran pengembangan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup. Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang Penyuluh Perikanan Kecamatan Bendungan, yang menjelaskan bahwa:

“...Untuk peran penyuluh sendiri sangat banyak ya mbak, saya disini juga merangkap sebagai mantri karena memang berhubung mantrinya belum ada. Saya juga sebagai tim teknis, memberikan motivasi kepada pembudidaya, memberikan inovasi-inovasi berdasarkan informasi yang saya dapatkan selama ini, menganalisa wirausaha, sebagai jembatan antara pembudidaya dengan Dinas jika pembudidaya akan melaporkan atau membutuhkan sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan minapolitan ini. Selain memberikan pengawasan perkembangan budidaya saya juga memberikan pelatihan dalam hal pemasaran serta kelancaran budidaya, kalau mereka membutuhkan pakan, benih jika saya bisa membantu ya saya bantu. Saya dan warga-warga disini sama-sama saling belajar mbak, yang saya dapatkan selama ini kan teorinya, warga disini malah sudah terjun ke lapangan jadi tahu juga perkembangan yang sebenarnya, kami istilahnya saling memberi dan menerima seperti itu mbak...”. (Wawancara hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 pukul 11.00 WIB di lokasi minapolitan Desa Sumurup).

Di Kecamatan Bendungan banyak daerah sebagai sasaran pengembangan budidaya perikanan, untuk itu dibentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk

kelancaran prosesnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek, bahwa:

“...Dengan mempertimbangkan bahwa sasaran daerah pengembangan budidaya perikanan tersebar di 8 desa di Kecamatan Bendungan, yaitu Desa Masaran, Desa Dompjong, Desa Boto Putih, Desa Suren Lor, Desa Sumurup, Desa Srabah, Desa Depok dan Desa Sengon maka dibentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB). Pembentukan KUB didasarkan pada kedekatan lokasi kolam budidaya dengan maksud untuk mempermudah saat musim panen dan mempermudah dalam pemasaran hasil mbak. Untuk itu perlu pembimbingan melalui pelatihan-pelatihan dari Penyuluh Perikanan ke lapangan secara berkala sehingga diharapkan pembudidaya-pembudidaya yang tergabung dalam kelompok tersebut mampu berusaha secara mandiri...”. (Wawancara hari Senin tanggal 4 Maret 2013 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup lembaga atau wadah yaitu Balai Benih Perikanan Kabupaten Trenggalek, Penyuluh Perikanan Kecamatan Bendungan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) mempunyai peran masing-masing dan tujuannya adalah kelancaran semua prosesnya demi keberhasilan kedepannya.

f. Ketepatan dari Kebijakan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya

Melalui pertanyaan terbuka peneliti mendapatkan informasi mengenai kendala apa saja yang dihadapi pembudidaya dalam menjalankan budidaya perikanan di Desa Sumurup. Kendala yang pertama mengenai modal, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua Pokdakan, bahwa:

“...Untuk masalah kendala yang pertama ya modal mbak. Awalnya memang modal selalu mengalir karena memang masih pembangunan serta pengembangan yang pertama, jadi untuk membangkitkan minat masyarakat

yang pertama memang diberi modal dari Dinas. Namun selanjutnya kurang begitu lancar, jadi kami disini kadang masih kekurangan dana untuk pembelian benih dan pakan ikan...”. (Wawancara hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 pukul 11.00 WIB di lokasi minapolitan Desa Sumurup).

Kendala selanjutnya yaitu mengenai benih seperti yang diungkapkan oleh salah satu Bapak Pelopor Petani Desa Sumurup bahwa:

“...Mencari benih yang bermutu itu susah mbak, kalau Balai Benih stoknya habis kami harus mencari benih sendiri. Sampai ke daerah-daerah yang memang terkenal mempunyai benih yang baik dan bermutu. Pada panen yang pertama kemarin kurang berhasil karena benihnya yang kurang bermutu, untuk selanjutnya kami tidak mau ambil resiko lagi, jadi kami benar-benar harus mencari benih yang baik dan bermutu agar panennya juga memuaskan. Kami disini juga mempunyai ide untuk membuat pembenihan sendiri, supaya kedepannya tidak kesusahan mendapatkan benih yang bermutu...”. (Wawancara, hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 pukul 13.00 WIB di lokasi minapolitan Desa Sumurup).

Untuk kendala yang terakhir adalah mengenai transportasi, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang Penyuluh Perikanan Kecamatan Bendungan, bahwa:

“...Masalah yang utama itu jalan, belum semuanya jalan menuju lokasi minapolitan ini diperbaiki. Jika panen besar pemasaran susah karena kendaraan besar tidak bisa masuk ke lokasi minapolitan. Bakul-bakul dari luar enggan mengambil hasil panen langsung ke lokasi karena harus mempertimbangkan kerugiannya juga. Namun rencananya jalan menuju lokasi minapolitan ini akan di aspal, akan dibangun juga tembok penahan jalan, dan pemappingan pada tahun ini, ya semoga cepat direalisasikan...”. (Wawancara hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 pukul 11.00 WIB di lokasi minapolitan Desa Sumurup).

Dari jawaban-jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi pembudidaya dalam menjalankan budidaya perikanan adalah modal, benih dan transportasi.

Sedangkan indikator yang dipakai peneliti untuk mengukur nilai ketepatan dari kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup ini

adalah apakah hasil dari kebijakan memuaskan kebutuhan atau nilai kelompok-kelompok tertentu.

Melalui pertanyaan terbuka peneliti mendapatkan informasi apakah hasil dari kebijakan memuaskan kebutuhan atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Berikut ini jawaban dari Ketua Pokdakan, yang menyatakan bahwa:

“Untuk masalah kepuasan hasil disini rata mbak, karena dengan budidaya ikan jika panen tiba hasilnya lumayan banyak dan memuaskan. Kelompok yang bisa mengembalikan lagi uang hasil panennya sebagai modal awal dikatakan berhasil mbak. Kadang ada kelompok yang waktu panen uang hasil dari penjualan ikan sebagian besar dinikmati untuk hal lain, jadi melupakan untuk membeli benih lagi itu yang susah. Istilahnya ya kelompok yang kuat dijamin hasilnya memuaskan, sedangkan kelompok yang belum stabil ya sebaliknya biasanya bingung dana untuk modal awalnya lagi mbak...”. (Wawancara hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 pukul 11.00 WIB di lokasi minapolitan Desa Sumurup).

Hal senada diungkapkan oleh salah seorang Penyuluh Perikanan Kecamatan Bendungan bahwa:

“...Sebelum adanya kebijakan minapolitan ini awalnya ada program wirausaha perikanan dulu. Wirausaha ini adalah tahap awal belajar dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana potensi masyarakat dalam membudidayakan ikan. Ternyata program wirausaha ini berhasil 70%, oleh karena itu kebijakan minapolitan akhirnya diputuskan di Desa Sumurup. Untuk pemberian bimbingan dan pelatihan mengenai budidaya perikanan sudah rata diberikan kepada warga sini. Keberhasilan ya tergantung pada warga dan kelompok yang memang bersungguh-sungguh melakukan usaha, kelompok yang kuat ya akan pasti berhasil...”. (Wawancara hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 pukul 11.00 WIB di lokasi minapolitan Desa Sumurup).

C. Pembahasan Data Fokus

1. Kebijakan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek.

Kebijakan publik dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kebijakan publik dibuat adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang di masyarakat. Masalah tersebut begitu banyak macam, variasi dan intensitasnya (Widodo, 2012:14-15). Minapolitan berbasis perikanan budidaya merupakan salah satu alternatif kebijakan dari agenda utama pembangunan Kabupaten Trenggalek yaitu memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi rakyat. Selain itu kebijakan minapolitan ini adalah sebagai kebijakan yang strategis untuk menghadapi masalah seperti masih banyaknya wilayah pedesaan yang belum mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada dengan baik.

Karakteristik Kawasan Minapolitan menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.18 Tahun 2011 antara lain :

- a. Suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa dan perdagangan;
- b. Mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi;
- c. Menampung dan memperkerjakan sumber daya manusia di dalam kawasan dan daerah sekitarnya; dan
- d. Mempunyai dampak positif terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.

Produksi serta pemasaran ikan sudah dilakukan oleh para pembudidaya di Desa Sumurup, sedangkan untuk sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek sudah

berusaha untuk memenuhi. Sumber daya manusia untuk pemeliharaan serta mengelola perikanan budidaya adalah masyarakat di sekitar kawasan minapolitan. Kebijakan minapolitan juga mempunyai dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat Desa Sumurup. Berdasarkan karakteristik kawasan minapolitan tersebut, untuk kawasan Desa Sumurup sebagian besar sudah memenuhi berbagai karakteristik yang ada.

Pengembangan kawasan minapolitan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan pada dasarnya dilakukan dan ditetapkan oleh Dinas serta masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip perencanaan dari bawah (*bottom up*) yang dilakukan secara demokratis, penggunaan *bottom up process* ini pimpinan tingkat bawah merasa diikutsertakan dalam penentuan sasaran sehingga gairah kerja, kreativitas dan loyalitas semakin terbuka (Adisasmita, 2005:212). Pemerintah provinsi dan pusat berperan melaksanakan fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota, agar kegiatan pengembangan kawasan minapolitan di lapangan berjalan lancar. Pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat. Pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan masyarakat, dan pengelolaan kegiatan pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Pengembangan kawasan minapolitan di Desa Sumurup berdasarkan Pedoman Perencanaan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya (Minapolitan) Tahun

2010 dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan arah kebijakan ekonomi nasional yaitu :

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.

Tujuan pelaksanaan kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup adalah untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, dengan hasil perikanan budidaya yang diperoleh maka akan menambah penghasilan ekonomi masyarakat.

2. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan kompetensi produk unggulan di setiap daerah.

Masyarakat Desa Sumurup mengembangkan dan memanfaatkan semua potensi unggulan serta sumber daya yang ada di desa tersebut. Pengembangan potensi tersebut direncanakan dan dilaksanakan secara menyeluruh dan disesuaikan dengan teknologi yang ada.

3. Memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi, agar mampu bekerjasama secara efektif, efisien dan berdaya saing.

Pemasaran ikan juga dilakukan dalam kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup.

4. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya perikanan budidaya dan budaya lokal.

Kabupaten Trenggalek pernah mengadakan Gerakan Gemar Makan Ikan yang diketuai oleh Ny. Penny Mulyadi, gerakan ini menganjurkan kepada masyarakat untuk mengonsumsi ikan.

5. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah dengan memberdayakan para pelaku sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Kebijakan minapolitan ini sebagian besar pelakunya adalah para pembudidaya, karena yang melakukan terjun langsung ke lapangan serta mengetahui perkembangan perikanan budidaya adalah para pembudidaya itu sendiri.

6. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah (khususnya pembudidaya ikan) dengan kepastian dan kejelasan hak dan kewajiban semua pihak.

Kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya akan mempercepat pembangunan pedesaan dengan memberdayakan masyarakat supaya mandiri dalam pengelolaan, pemeliharaan serta pengembangan perikanan budidaya.

7. Memaksimalkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau seluruh kegiatan pembangunan di daerah.

Para pembudidaya tidak melakukan kegiatan pengembangan kawasan minapolitan tanpa pengawasan dari berbagai pihak yang terkait. Hal ini juga akan selalu dipantau oleh Penyuluh Perikanan Kecamatan Bendungan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek demi kelancaran kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kebijakan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek.

Pengembangan kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek akan berhasil jika ditunjang oleh pemilihan lokasi yang didasarkan atas ketersediaan lahan, kesesuaian lahan, kesiapan prasarana, alat dan bahan, sistem pemasaran, keamanan usaha, partisipasi warga dan kemitraan yang dilakukan, ketersediaan tenaga kerja serta sumberdaya lain yang membentuk keunggulan lokasi. Pemilihan komoditas utama dan penunjang serta jenis usahanya didasarkan atas potensi daerah yang menghasilkan keuntungan, potensi pemasarannya, kesiapan dan penerimaan masyarakat atas jenis perikanan budidaya yang akan dikembangkan, serta keselarasan dengan kebijakan pembangunan daerah. Untuk mengetahui keunggulan wilayah serta komoditas yang dipilih dilakukan analisis dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya.

a. Pemilihan Lokasi

Pemilihan lokasi minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup diperkuat dengan adanya survei lapangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek serta berbagai pihak yang terlibat. Hasil survei lapangan tersebut menghasilkan keputusan bahwa peluang yang sangat tinggi dan potensi yang sesuai adalah di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan. Oleh karena itu,

berdasarkan survei lapangan tersebut maka kebijakan minapolitan ini dilaksanakan di Desa Sumurup. Pemilihan lokasi yang tepat akan membantu kelancaran proses pelaksanaan suatu kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya.

Menurut Ghufran (2008:154) lokasi yang dipilih untuk pembuatan kolam pemilikan tanahnya harus jelas. Pemilikan tanah yang jelas ini penting untuk menghindari terjadinya kerugian yang besar di kemudian hari. Dalam usaha apapun termasuk perikanan budidaya, pemilihan lokasi merupakan bagian penting dalam menunjang keberhasilan perikanan budidaya. Kesalahan dalam memilih lokasi bisa mengakibatkan kerugian secara finansial dan waktu. Oleh karena itu, dalam memilih lokasi harus yang bisa menguntungkan dan didasarkan pada pertimbangan yang telah diperhitungkan dengan baik.

Pemilihan lokasi kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek sudah dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan baik. Dalam pemilihan lokasi sudah sesuai dengan kriteria umum yang menjadi acuan dalam perencanaan pengembangan kawasan perikanan budidaya (minapolitan) menurut Pedoman Perencanaan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya (Minapolitan) Tahun 2010. Kriterianya yaitu penggunaan lahan untuk kegiatan perikanan harus memanfaatkan potensi yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi dan wajib memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup serta mencegah rusaknya.

Lahan yang digunakan untuk membuat kolam adalah lahan atau tanah warga yang statusnya adalah milik warga sendiri, bukan tanah sengketa maupun tanah

milik pemerintah. Faktor lain yang mempengaruhi pemilihan lokasi adalah mengenai pasokan air, di lokasi budidaya yang dipilih ini pasokan airnya sangat melimpah dan sumber airnya sangat banyak yang dapat menguntungkan pembudidaya. Karena faktor yang sangat penting untuk perikanan budidaya ini adalah air, jadi pemilihan lokasi minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup sudah sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut dan sangat menjaga lingkungan karena tidak ada pencemaran air, limbah juga bisa dialirkan ke sawah dan digunakan sebagai pupuk. Lokasi budidaya perikanan yang dipilih adalah lokasi yang mudah dijangkau, lokasi budidaya di Desa Sumurup berdekatan dengan rumah tempat tinggal warga, hal ini bertujuan supaya lebih mudah dalam pemeliharaan perikanan budidaya.

b. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pemilihan tenaga kerja yang tepat dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki juga akan membantu kelancaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Tenaga kerja menurut Subri dalam Dody (2011:16) adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15–64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Dalam

usaha budidaya perikanan skala besar, dikenal dua macam kategori tenaga kerja, yaitu tenaga kerja biasa dan tenaga kerja khusus (ahli). Tenaga kerja biasa dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan biasa, seperti penggalian, penimbunan, dan sebagainya. Sedangkan tenaga kerja khusus dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan keahlian, seperti survei lokasi, analisis kelayakan tanah, juga sebagai teknisi dan konsultan untuk pengelolaan budidaya perikanan, seperti ahli pakan, ahli penyakit, dan sebagainya.

Tenaga kerja dalam pelaksanaan kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup ini sebagian besar adalah warga yang berada di sekitar lokasi budidaya, jadi jika terdapat informasi terkini cepat menyebar kepada pembudidaya yang lain. Tenaga kerja untuk pengembangan perikanan budidaya ini adalah tenaga kerja yang dari awal memang sudah minat dengan kebijakan minapolitan ini, dan sebagian besar ada yang sudah mengetahui tentang dasar-dasar melakukan budidaya ikan. Untuk tenaga kerja khusus (ahli) salah satunya adalah Penyuluh Perikanan Kecamatan Bendungan, karena yang sangat berperan besar untuk pengembangan perikanan budidaya di Desa Sumurup adalah penyuluh perikanan. Penyuluh perikanan selalu terjun ke lapangan, jadi mengetahui secara langsung informasi terkini mengenai perkembangan perikanan budidaya. Penyuluh perikanan selain berperan sebagai teknisi juga sebagai ahli pakan dan merangkap sebagai mantri (ahli penyakit).

Tenaga kerja dalam mewujudkan kelancaran serta berhasilnya suatu kebijakan tidak bisa hanya dilakukan oleh tenaga kerja biasa tanpa adanya tenaga khusus/ahli. Untuk mendukung berhasilnya suatu kebijakan maka dari semua

tenaga kerja harus saling mendukung dan menjalankan pekerjaannya sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.18 Tahun 2011 suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan minapolitan apabila memenuhi persyaratan bahwa jumlah pelaku utama/usaha perikanan relatif besar atau sebagian besar penduduk setempat bekerja di kawasan tersebut. Berdasarkan keputusan tersebut kebijakan minapolitan di Desa Sumurup ini sudah memenuhi salah satu syarat yang sudah ditetapkan yaitu sebagian besar tenaga kerja adalah warga penduduk sekitar lokasi budidaya.

c. Sarana dan Prasarana Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi perlu dipertimbangkan menyangkut kecepatan dan ketepatan pengangkutan hasil panen serta bahan dan alat yang diperlukan. Untuk sarana transportasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek salah satunya memberikan bantuan tiga buah motor plat merah kepada pedagang (bakul) di sekitar lokasi perikanan budidaya. Motor ini diberikan kepada pedagang (bakul) demi kelancaran pelaksanaan budidaya perikanan dan memudahkan pedagang (bakul) untuk mengambil hasil panen dari para pembudidaya serta memberikan kelancaran dalam pemasaran ikan ke pasar. Sarana dan prasarana transportasi yang memadai juga akan membantu kelancaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ghufrani (2008:156), bahwa :

Lokasi yang dipilih untuk membuka usaha budidaya perikanan harus dijangkau dengan mudah dari berbagai arah agar pengadaan benih, pengadaan alat dan bahan, pengadaan pakan, pemasaran hasil panen, dan keperluan kebutuhan lainnya dapat berjalan lancar. Artinya, sarana dan prasarana transportasi untuk ke dan dari lokasi tersebut tersedia secara memadai.

Prasarana atau infrastruktur menurut Jayadinata (1999:31) adalah alat (mungkin tempat) yang paling utama dalam kegiatan sosial atau kegiatan ekonomi. Sedangkan sarana merupakan alat pembantu dalam prasarana itu. Baik prasarana maupun sarana tidak bisa terlepas satu dengan yang lain, sehingga keduanya harus dipahami sebagai satu kesatuan.

Prasarana transportasi juga tidak kalah pentingnya dalam menunjang kelancaran transportasi, faktor yang sangat mempengaruhi lancarnya transportasi adalah jalan. Jalan menuju lokasi perikanan budidaya kondisinya kurang bagus, jalannya tidak begitu lebar dan banyak yang berlubang. Kondisi jalan yang kurang bagus tersebut menjadi salah satu masalah dalam proses pemasaran hasil panen ikan. Jika ada panen besar mobil pengangkut ikan yang besar tidak bisa melewati jalan yang menuju ke lokasi budidaya, hal ini disebabkan oleh struktur jalan yang tidak bisa membawa beban berat. Apabila masalah kondisi jalan ini tidak segera diperbaiki maka akan menghambat proses transportasi.

Berdasarkan karakteristik kawasan minapolitan menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.18 Tahun 2011 salah satunya adalah mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi. Hal ini sesuai dengan pemberian sarana salah satunya motor untuk kelancaran pemasaran ikan. Sedangkan jaringan jalan sebagai prasarana dan modal penting

untuk menghubungkan lokasi perikanan budidaya dengan kawasan sekitar masih terdapat kekurangan dalam proses perbaikannya.

d. Alat dan Bahan

Alat dan bahan tidak hanya dibutuhkan/digunakan pada awal usaha, tetapi selama usaha berlangsung, maka perlu disediakan dalam jumlah yang cukup sehingga sewaktu-waktu langsung diambil. Untuk itu, perlu disediakan gudang khusus untuk menyimpan alat dan bahan tersebut. Alat dan bahan yang memadai juga akan membantu kelancaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek sudah memberikan bantuan alat dan bahan untuk penunjang kelancaran perikanan budidaya.

Semua alat yang diberikan kepada kelompok pembudidaya penyimpanannya masih di rumah Ketua Pokdakan, hal ini dikarenakan gudang/rumah mesin masih dalam proses pembangunan. Pembangunan gudang/rumah mesin ini merupakan proses swadaya kelompok pembudidaya, jadi tidak ada campur tangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek. Pembangunan gudang/rumah mesin ini belum selesai karena masih banyak kekurangan dana, awalnya kelompok pembudidaya mengumpulkan dana sendiri namun ternyata tidak cukup untuk proses penyelesaian gudang/rumah mesin ini. Sehingga alat-alat yang ada masih berada di rumah Ketua Pokdakan.

Penggunaan bahan lokal tentu menguntungkan bagi penduduk setempat jika mereka dapat memproduksinya. Namun, harus dipertimbangkan faktor-faktor

dampak yang mungkin ditimbulkannya, seperti tekanan terhadap sumber daya yang dalam jangka panjang akan berdampak pada ekonomi masyarakat (Ghufran, 2008:157). Untuk masalah bahan lokal warga Desa Sumurup memang menggunakan daun talas sebagai tambahan pakan ikan. Namun hal ini tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi warga setempat karena memang daun talas adalah tanaman warga yang bukan dijadikan sebagai tanaman utama seperti padi, ketela dan jagung. Jadi penggunaan bahan lokal yaitu daun talas tidak mempengaruhi dan tidak berdampak buruk pada ekonomi warga Desa Sumurup.

e. Harga dan Pasar

Pasar sangat penting untuk kelangsungan produksi. Apabila produksi telah berjalan, keberhasilan usaha perikanan budidaya ditentukan oleh kemampuan dalam menganalisis dan mengantisipasi pasar. Jika ada perubahan dan perkembangan yang terjadi di pasar harus selalu tanggap. Ada beberapa yang harus diketahui oleh pembudidaya sebelum melangkah ke aspek pemasaran, yaitu sasaran pemasaran, persaingan dan strategi pemasaran (Ghufran, 2008:158). Harga serta pemasaran yang sesuai juga akan membantu kelancaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup. Kegiatan pemasaran juga dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup luas dalam setiap rantai pemasaran, juga menjadi sumber penghasilan kelompok masyarakat yang terlibat didalamnya.

Pemasaran hasil perikanan menurut Swasita dalam Widodo (2008:34) adalah keseluruhan kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan

harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa dari perikanan agar dapat memuaskan kebutuhan pembeli yang ada maupun potensial. Mengenai sasaran pemasaran serta strategi pemasaran sudah dilakukan oleh pembudidaya Desa Sumurup, hal ini juga dilakukan utamanya oleh ketiga pedagang (bakul). Untuk sasaran pemasaran ketiga pedagang (bakul) mempunyai daerah pemasaran yang berbeda, yaitu ada 4 pasar antara lain Pasar Gempleng, Pasar Subuh, Pasar Jarakan dan Pasar Tugu. Strategi pemasaran yang dilakukan adalah berbedanya tempat pemasaran setiap pedagang (bakul), hal ini karena harus menyesuaikan dengan permintaan pasar. Setiap pedagang (bakul) sudah mengetahui keadaan pasar jadi mereka membagi tugas untuk daerah pemasarannya.

Ikan pada dasarnya mempunyai sifat yang mudah rusak, oleh sebab itu hasil perikanan memerlukan penanganan yang memadai mulai dari panen sampai ke tempat pelelangan atau sebelum mencapai konsumen. Banyak produk perikanan yang nilainya menjadi sangat turun karena kurang baik dalam penanganan hasil perikanan (Widodo, 2008:34). Penanganan pasca panen tidak hanya berfungsi untuk menjaga mutu produk perikanan tetapi juga berfungsi untuk mempertahankan nilai ekonomi yang dimilikinya.

Sering juga harga hasil-hasil perikanan menjadi sangat rendah karena pasar dikuasai oleh beberapa pembeli yang memiliki posisi tawar lebih kuat dari produsen, apalagi pada musim panen yang menyebabkan ketersediaan suatu komoditi di pasar sangat melimpah. Faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan untuk menekan kerugian. Kondisi alam (musim), persaingan, dan perilaku konsumen adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap harga dan pasar suatu komoditas,

termasuk komoditas perikanan (Ghufran, 2008:159). Berdasarkan penjelasan dari Ghufran tersebut untuk pembudidaya serta pedagang (bakul) sudah bisa mengantisipasi dengan baik, setiap hari pembudidaya serta pedagang (bakul) selalu memantau perkembangan harga serta permintaan pasar. Jadi untuk harga setiap hari bisa berubah, pedagang (bakul) bisa menganalisis berapa keuntungan yang diperoleh, untuk harga ikan lele informasi terakhir per kg adalah Rp 12.200,- dan dijual sekitar Rp 14.000,- jadi mendapatkan untung Rp Rp 2.800,- per kg untuk ikan nila per kg adalah Rp 12.000,-

Sistem pemasaran yang ada di Desa Sumurup adalah menggunakan ukuran konsumsi, cara pemasaran yang dilakukan menggunakan satuan berat. Untuk daerah pemasaran lebih banyak di luar kabupaten, hal ini disesuaikan dengan permintaan pasar. Untuk daerah lokal dikonsumsi oleh warga sekitar lokasi budidaya serta warga dari desa tetangga. Sedangkan untuk daerah dalam kabupaten yaitu pemasarannya melalui ketiga pedagang (bakul) yang mengambil ikan langsung dari petani dan kemudian dijual sesuai dengan pembagian tempat pemasaran yang sudah disepakati.

f. Keamanan Usaha

Keamanan usaha perikanan budidaya harus diperhatikan, baik dari gangguan hama dan penyakit maupun tangan-tangan jahil. Untuk pencegahan dari pencurian dilakukan dengan menjaga area budidaya. Artinya area pemeliharaan budidaya tidak dibiarkan, terutama jika di daerah tersebut rawan pencurian. Perlu juga diperhatikan agar dalam usaha perikanan budidaya di suatu daerah tidak sampai

membawa dampak yang merugikan masyarakat di sekitarnya, karena hal ini mengundang protes dan perlawanan dari masyarakat (Ghufran, 2008:159-160).

Keamanan usaha yang baik juga akan membantu kelancaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup.

Keamanan usaha dalam perikanan budidaya sangat diperhatikan oleh pembudidaya Desa Sumurup, yaitu dengan mengantisipasi dan memperhatikan masalah gangguan hama terhadap budidaya ikan. Selain selalu memperhatikan pemberian vitamin, jika ada ikan yang sakit dilihat dulu bagaimana ciri-cirinya kemudian baru ditindaklanjuti untuk pemberian obatnya. Jika ikan hanya sakit biasa pembudidaya bisa memberikan obat-obatan tradisional seperti yang disarankan oleh Penyuluh Perikanan Kecamatan Bendungan. Namun jika ikan tidak sembuh-sembuh maka pembudidaya selalu melapor kepada Penyuluh Perikanan dan segera ditindaklanjuti supaya penyakit tidak menyebar ke ikan lain yang bisa merugikan pembudidaya nantinya.

Karakteristik dari keamanan mencakup 3 hal menurut Craven (2001) yaitu *pervasiveness* (mempengaruhi/mengisi), *perception* (persepsi), dan *management* (managemen).

1. *Pervasiveness*

Kemanan adalah pengisi, mempengaruhi segalanya. Secara khusus, individu sangat memperhatikan kemanan pada setiap atau semua aktivitasnya, termasuk makan, bernafas, tidur, bekerja, dan bermain. Secara umum, individu mengasumsikan atau bertanggung jawab terhadap kemanan diri mereka sendiri.

2. *Perception*

Persepsi seseorang terhadap bahaya mempengaruhi dalam penyusunan kemanan ke dalam aktivitas sehari-hari mereka. Pengukuran kemanan efektif hanya sejauh sebagai seseorang yang mengerti secara akurat dan menghindari bahaya. Manusia tidak mengerti faktor-faktor keamanan, tetapi mereka belajar secara sendiri melalui proses kehidupan mereka.

3. *Management*

Seseorang mungkin pada suatu waktu menyadari bahaya dalam lingkungannya. Ia akan mengukur terhadap hal tersebut untuk mencegah bahaya dan mempraktekkan keamanan. Pencegahan adalah karakteristik utama dari keamanan. Perawatan diri termasuk dalam praktek keamanan, tetapi keamanan bagi yang lainnya harus memberikan hal yang lebih baik.

Mengenai masalah pencegahan dari pencurian, pembudidaya mempunyai inisiatif sendiri dengan membangun poskamling untuk menjaga area budidaya. Poskamling yang dibangun pembudidaya berdekatan dengan area perikanan budidaya, jadi pembudidaya mudah untuk menjaga keamanan area budidaya. Pembudidaya juga membuat jadwal siskamling, jadi setiap hari yang menjaga selalu bergantian. Warga Desa Sumurup sudah sadar akan pentingnya keamanan area budidaya, jadi warga setempat tidak merasa terpaksa dalam menjalankan sistem siskamling yang sudah disepakati.

g. Partisipasi dan Kemitraan

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah (Loina, 2003:19). Partisipasi yang baik akan membantu kelancaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup. Awal sebelum adanya kebijakan minapolitan di Desa Sumurup warga sudah banyak yang mengembangkan wirausaha ikan, jadi ketika kebijakan minapolitan ini masuk serta ada sosialisasi banyak warga yang setuju dan akhirnya minat dengan pelaksanaan kebijakan minapolitan di desa mereka.

Wirausaha ikan yang sudah dilakukan warga Desa Sumurup dengan adanya kebijakan minapolitan ini semakin baik karena pemberian teknik-teknik serta

pelatihan yang bisa meningkatkan kualitas budidaya ikan mereka. Mengenai partisipasi, warga juga menyampaikan ide serta masukan kepada Dinas serta pihak yang terlibat dalam kebijakan minapolitan ini. Hal ini menjadikan nilai tersendiri bagi Dinas serta pihak yang lain karena memang warga Desa Sumurup yang selama ini sudah menjalankan wirausaha lebih mengetahui keadaan lapangan.

Partisipasi dalam kelompok budidaya juga dilakukan dengan baik, jika terdapat perkembangan informasi terkini dari Dinas Kelautan dan Perikanan ketua kelompok yang mewakili. Setelah itu ketua kelompok mengajak anggotanya untuk rapat membahas masalah tersebut dan selalu bertukar pendapat sampai menemukan keputusan terbaik mereka. Jadi intinya tidak hanya ketua kelompok yang dominan mendapatkan informasi sendiri tetapi selalu menyampaikan kepada semua anggotanya demi lancarnya budidaya mereka, jadi semua mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan informasi terkini.

Perlibatan masyarakat lokal dapat dilakukan dalam berbagai bentuk secara transparan dan proporsional. Usaha-usaha yang telah dikembangkan oleh masyarakat bisa dilibatkan dalam pola kemitraan, yang memungkinkan usaha-usaha rakyat dapat memproduksi komoditas budidaya yang berkualitas (Ghufran, 2008:161). Kemitraan yang baik juga akan membantu kelancaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup. Kemitraan dalam kebijakan minapolitan ini juga sudah dilakukan dengan baik oleh warga Desa Sumurup, kemitraan yang dilakukan antar petani/pembudidaya dengan para pedagang (bakul), jika petani/pembudidaya

kesulitan dalam mencari benih dan pakan maka pedagang (bakul) yang akan mencarikan benih serta pakan tersebut. Sebaliknya pedagang (bakul) tersebut akan memotongnya dengan hasil panen petani/pembudidaya yang bersangkutan, proses kemitraan yang dijalankan tersebut berlangsung tanpa ada sesuatu aturan formal, semua didasari oleh rasa percaya antar pelaku.

Pola kemitraan sebagai suatu inovasi mengandung pengertian bahwa telah terjadi proses pembaharuan inovasi atau sesuatu yang baru terhadap pola kemitraan bukan sesuatu yang baru sama sekali di dunia petani, tetapi telah mengalami proses perubahan dari waktu ke waktu (Purnaningsih, 2007:394). Dalam kemitraan yang dilakukan tersebut masing-masing pihak saling merasakan keuntungan. Untuk petani/pembudidaya tidak kesulitan dalam mencari benih serta pakannya, dan keuntungan lainnya adalah hasil panennya selalu terjual semua kepada pedagang (bakul). Sedangkan keuntungan yang diperoleh pedagang (bakul) adalah dari benih, pakan, serta hasil panen ikan dari para mitra mereka yaitu petani/pembudidaya. Kemitraan yang dilakukan di Desa Sumurup ini sangat *simple* dan jika selanjutnya selalu dilakukan dengan baik maka akan memperkuat hubungan mitra mereka, karena kemitraan yang dilakukan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.

3. Evaluasi Kebijakan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Desa Sumurup Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek

a. Efektifitas dari Kebijakan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas juga bisa diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Efektif berarti bahwa output yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Adisasmita, 2005:212)

Dalam efektivitas kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek bertumpu pada Peraturan Menteri nomor 12/2010 tentang Minapolitan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Salah satu prinsip pengembangan kawasan minapolitan yaitu pengembangan ekonomi kerakyatan. Pembangunan ekonomi kerakyatan pada intinya adalah mengelola seluruh potensi ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan menerapkan prinsip atau asas ekonomi kerakyatan. Program prioritas pengembangan ekonomi kerakyatan khususnya yaitu pembangunan perikanan dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat pembudidaya ikan. Hal tersebut sesuai dengan salah satu sasaran

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat perikanan.

Sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek merumuskan konsep pengembangan kawasan perikanan budidaya yang diawali dengan identifikasi potensi dan masalah pembangunan di Desa Sumurup. Identifikasi potensi dan masalah pemanfaatan ruang tidak hanya mencakup perhatian pada masa sekarang namun juga potensi dan masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dilakukan dan ditetapkan oleh masyarakat Desa Sumurup yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek. Pemerintah kabupaten berperan memberikan fasilitas kepada masyarakat Desa Sumurup, agar kegiatan pengembangan kawasan minapolitan di lapangan berjalan lancar.

Menurut Dunn (1999:429), “efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.” Berdasarkan penjelasan dari Dunn tersebut sebagian besar masyarakat Desa Sumurup menjalankan usaha perikanan budidaya adalah untuk menambah penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil panen ikan dan masyarakat sudah bisa menikmati hasilnya. Masyarakat Desa Sumurup lebih memilih untuk mengembangkan perikanan budidaya dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan alternatif yang terdapat dalam salah satu sasaran program pengembangan kawasan minapolitan yaitu pengembangan ekonomi kerakyatan.

b. Efisiensi dari Kebijakan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya

Efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Kabupaten Trenggalek Tahun 2010, argumentasi mengapa menggunakan kebijakan minapolitan sebagai instrumen untuk meningkatkan target dan kinerja adalah karena :

1. Minapolitan sebagai suatu sistem peningkatan kinerja yang memiliki keunggulan.

Konsep minapolitan akan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan minapolitan di daerah-daerah yang mempunyai potensial unggulan. Desa Sumurup ini mempunyai tanah luas yang bisa digunakan untuk pembangunan kolam ikan, selain itu juga memiliki pasokan air yang melimpah. Masyarakat Desa Sumurup awalnya sebagian besar adalah petani, dengan adanya kebijakan minapolitan ini warga yang awalnya hanya sebagai petani sudah merambah sebagai wirausaha pembudidaya ikan. Sebagai pembudidaya ikan karena memang memanfaatkan potensi yang ada di Desa Sumurup.

2. Minapolitan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat perikanan.

Masyarakat Desa Sumurup awalnya belum mengetahui secara menyeluruh mengenai langkah-langkah dalam budidaya ikan. Oleh karena itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek serta Penyuluh

Perikanan Kecamatan Bendungan memberikan sosialisasi serta pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat Desa Sumurup. Hal tersebut mempunyai tujuan agar bisa secara optimal mengembangkan kegiatan perikanan budidaya dan bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa.

Menurut Dunn (1999:430), efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima. Hal ini sesuai dengan perbandingan antara hasil yang diperoleh dari lahan yang dimanfaatkan untuk sawah dan lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya ikan. Untuk lahan 6x10 m yang dimanfaatkan untuk menanam padi hasilnya sekali panen adalah 1 kw dengan hasil Rp 450.000,- (belum dikurangi untuk benih dan pupuk). Sedangkan untuk lahan 6x10 m yang dimanfaatkan untuk budidaya perikanan hasilnya sekali panen adalah 2 kw jika dalam penjualannya 1 kg isi 5 ekor ikan hasilnya adalah Rp 2.400.000,- (belum dikurangi untuk benih dan pupuk).

Jika dilihat dari perbandingan tersebut maka untuk pencapaian hasil yang optimum adalah dari manfaat lahan yang digunakan untuk perikanan budidaya. Oleh karena itu, banyak masyarakat Desa Sumurup yang memilih untuk menjalankan usaha perikanan budidaya daripada memanfaatkan lahan dan sawah mereka untuk pertanian. Usaha yang diperlukan yaitu perikanan budidaya yang merupakan salah satu cara untuk menghasilkan tingkat efisiensi dari kebijakan minapolitan. Efisien menurut Adisasmita (2005:212) berarti bahwa segala input

dialokasikan sedemikian rupa sehingga output dapat diproduksi dengan biaya termurah.

c. Kecukupan dari Kebijakan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya

Kecukupan dari suatu kebijakan publik dapat diukur dari nilai prosentase seberapa jauh kebijakan (capaian kebijakan) itu sudah dilaksanakan. Kecukupan juga berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 1999:430). Sedangkan yang berkaitan dengan efektivitas kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek sudah berusaha memaksimalkan usaha-usaha yang diperlukan dalam memecahkan masalah seperti jaringan jalan, pemasaran, dan kegiatan-kegiatan untuk melancarkan usaha perikanan budidaya.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh peneliti kecukupan dari pelaksanaan kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup sudah sesuai dengan standar-standar yang tertuang dalam Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Kabupaten Trenggalek Tahun 2010.. Hanya saja perlu pembinaan lebih lanjut dari para implementator kebijakan teknis, serta kekurangan yang ada selanjutnya bisa diperbaiki agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Minapolitan berbasis perikanan budidaya yang berkelanjutan tidak hanya mengenai unsur kondisi ikan, lingkungan perairan, teknologi, ekonomi dan sosial budaya sehingga dalam pengelolaannya ditempuh melalui pendekatan yang melibatkan semua komponen di atas. Atas dasar

pertimbangan tersebut, pengelolaan usaha pengembangan minapolitan dilakukan dengan cara pendekatan teknis dan koordinatif, sehingga menghasilkan jaringan kerja usaha secara sinergis guna mendapatkan hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Kecukupan berarti dapat diselesaikan atau terpecahkannya berbagai masalah yang dihadapi melalui (oleh) kegiatan atau tindakan yang telah diprogramkan (Adisasmita, 2005:212). Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek bisa membantu pelaksanaan kebijakan minapolitan menjadi lebih efektif dengan memenuhi kekurangan standar-standar yang sudah ditetapkan dalam Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Kabupaten Trenggalek Tahun 2010. Langkah yang perlu diambil regulator minapolitan adalah mengoreksi masalah yang selama ini menjadi kekurangan dalam kebijakan minapolitan dan berusaha untuk memperbaikinya.

d. Perataan dari Kebijakan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya

Perataan erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya secara adil didistribusikan (Dunn, 1999:434). Kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya dirancang untuk mampu mendistribusikan hasil pendapatan pembudidaya, kesejahteraan masyarakat, dan kesempatan kerja.

Salah satu tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan konsep minapolitan adalah meningkatkan pendapatan pembudidaya yang adil dan merata,

serta mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat. Berdasarkan kenyataan di lapangan dapat diketahui bahwa kendala atas kinerja para pembudidaya adalah terletak pada kemampuan pengelolaan usaha serta keterbatasan modal usaha. Tidak semua pembudidaya mempunyai jiwa bisnis, dan mengenai keterbatasan modal juga akan mempengaruhi hasil budidaya serta mengurangi efisiensi dan membatasi tingkat keuntungan. Untuk program penunjang minapolitan bantuan yang diberikan tidak secara merata, hal ini karena bantuan yang diberikan berdasarkan pada program dan minat warga. Sedangkan untuk kebijakan minapolitan bantuan yang diberikan merata karena pembangunan kolam dilakukan secara serentak, namun yang tetap membedakan adalah modal setiap pembudidaya untuk pembelian pakan, jika setiap pembudidaya berbeda dalam pemberian pakan maka konsidi ikan dipastikan juga akan berbeda yang menyebabkan perbedaan hasil akhirnya.

Selanjutnya mengenai ancaman keberadaan kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup warga tidak merasa terancam dan tidak merasa dirugikan. Banyak warga yang dari awal sudah mendukung kebijakan ini dan ada yang sudah melakukan wirausaha ikan juga. Dengan adanya kebijakan minapolitan ini memberikan kesempatan kerja kepada warga, dan untuk menjadikan perikanan budidaya sebagai mata pencaharian jika warga minimal mempunyai 20 kolam. Kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya ini merupakan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Bendungan dengan Desa Sumurup sebagai pusat kegiatannya.

e.Responsivitas dari Kebijakan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya

Menciptakan kegiatan ekonomi perikanan budidaya yang baik perlu didukung oleh peran kelembagaan dalam pengembangan minapolitan. Peran kelembagaan memiliki potensi untuk mendukung kelancaran tujuan minapolitan berbasis perikanan budidaya yang telah ditetapkan. Potensi sumber daya yang ada (baik manusia maupun sumber daya alam), serta motivasi masyarakat setempat dalam mendukung usaha perikanan budidaya merupakan faktor yang sangat penting untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan semua kelompok.

Peran semua lembaga yang dilakukan secara koordinatif dan strategis akan mengurangi terjadinya kesenjangan informasi dengan pembudidaya. Semua peran diarahkan untuk menyatukan secara strategis program dari institusi-institusi skala nasional yang mempunyai muatan sasaran untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Kelembagaan yang terkait dengan pengembangan kegiatan minapolitan berbasis perikanan budidaya adalah Balai Benih Perikanan Kabupaten Trenggalek, Penyuluh Perikanan Kecamatan Bendungan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Peran dari semua lembaga yang terkait sangat menentukan kelancaran kegiatan perikanan budidaya, segala kebutuhan pembudidaya dapat terpenuhi dengan benih-benih yang disediakan di Balai Benih Perikanan, kemudian untuk masalah teknisi, ahli pakan serta ahli penyakit bisa terpenuhi melalui peran Penyuluh Perikanan. Untuk pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) didasarkan pada kedekatan lokasi kolam budidaya dengan maksud untuk mempermudah saat musim panen dan mempermudah dalam pemasaran hasil panen ikan.

Dalam manajemen pelayanan publik responsivitas (*responsiveness*) adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian responsivitas adalah menyangkut kemampuan organisasi/aparat pelayanan untuk menyesuaikan dengan tuntutan perubahan kebutuhan masyarakat, bahkan diperlukan adanya gerakan penyadaran hak-hak pengguna jasa pelayanan melalui partisipasinya dalam pembuatan keputusan yang menyangkut konteks dan konten pelayanan itu sendiri. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 1999:438).

Berdasarkan penjelasan dari Dunn di atas, Balai Benih Perikanan Kabupaten Trenggalek, Penyuluh Perikanan Kecamatan Bendungan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) mempunyai peran masing-masing. Selain itu lembaga tersebut juga saling terkait, hal ini tujuannya adalah kelancaran semua prosesnya demi keberhasilan minabisnis kedepannya. Minabisnis merupakan suatu kegiatan penanganan komoditas secara komprehensif mulai dari hulu sampai hilir (pengadaan dan penyaluran input, proses produksi, pengolahan dan pemasaran). Pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan sebagai sentra produksi pembelajaran dan pengembangan minabisnis merupakan salah satu dari arah pengembangan minapolitan dalam Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Kabupaten Trenggalek Tahun 2010.

f. Ketepatan dari Kebijakan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya

Dalam Peraturan Bupati Trenggalek nomor 67 tahun 2010 tentang Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya di Kabupaten Trenggalek, tujuan dari minapolitan yaitu :

1. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk perikanan;
2. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengusaha dan pengolah ikan yang adil dan merata;
3. Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari ketiga tujuan yang diinginkan dalam kebijakan minapolitan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek sudah cukup berhasil mencapai beberapa tujuan. Ini dilihat dari berkembangnya sentra komoditas andalan yang berbasis potensi di wilayah Desa Sumurup, serta berkembangnya pembangunan ekonomi kerakyatan yang pada intinya adalah mengelola seluruh potensi ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah Kabupaten Trenggalek memberikan hak dan kesempatan kepada masyarakat untuk memperluas usaha ekonomi masyarakat dengan mengembangkan usaha minapolitan. Dengan berkembangnya kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup secara otomatis membuka kesempatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat, karena memang salah satu arah pengembangan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mampu memanfaatkan potensi/peleluang ekonomi yang ada di desanya. Berbagai tujuan yang telah dicapai tersebut bisa diketahui sejauh mana kebijakan minapolitan berbasis perikanan

budidaya yang dijalankan sudah mampu menyelesaikan masalah yang ada. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Winarno (2012:250) bahwa :

Suatu evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sejauh mana program-program kebijakan yang telah dijalankan mampu menyelesaikan masalah-masalah publik. Ini berarti bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi suatu program kebijakan dijalankan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada.

Pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan minapolitan berbasis perikanan budidaya. Seiring berjalannya kebijakan minapolitan ini, berdasarkan kenyataan di lapangan masih terdapat beberapa kendala yang dikeluhkan pembudidaya. Kendala yang dihadapi para pembudidaya dalam menjalankan budidaya perikanan adalah kurangnya modal, benih dan masalah transportasi. Hal ini yang bisa menyebabkan menurunnya produksi, produktivitas dan kualitas produk perikanan. Kelompok yang belum stabil dalam menjalankan perikanan budidaya produktivitasnya akan menurun karena kekurangan dana untuk modal awalnya, sedangkan keberhasilan perikanan budidaya tergantung pada warga dan kelompok yang memang bersungguh-sungguh melakukan usaha.